

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL PENGUSAHA TEMPE”**

**(Studi Tentang Implementasi Undang - Undang No.5 Tahun 1995
Tentang Usaha Kecil Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Dan Birokrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

Hj. SRI MULYANA, SE

NIM: 018788181

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

"COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF SMALL TEMPE INDUSTRY" (Implementation Study of the Act No. 5 Year 1995 on Small Business in the Madurejo Village, District of South Arut, Kotawaringin Barat Regency)

SRI MULYANA
Universitas Terbuka
srimulyana64@gmail.com

Government of West Kotawaringin as actors in facilitating the empowerment process tempe entrepreneurs have their role as agents of development. But in reality, or the role of assistance desired by industry employers tempeh from the government to be able to help and guide them to be more independent, can not be maximized and not all employers tempeh industry can feel it. The assistance provided by the new government in action business opportunities and business opportunities for business development tempe industry.

There for, this study aims to look at the dynamics of social and economic phenomena in the moving industry tempeh. The research problem is taken about the government's efforts in empowering small businesses tempe industry in Sub districts Arut South West Kotawaringin; and actors in the process of supporting and empowering industry tempeh chips in order to improve the competitiveness of industrial entrepreneurs Tempe Southern District of West Kotawaringin Arut. The theory is used to analyze the theory of development administration, community development, and small industries. With descriptive qualitative research method. From the results of the study note that the role of the Department of Cooperatives, Markets, and the empowerment of SMEs in order to improve the soybean industry competitiveness is to efforts in accordance with the strategic plan that has been created.

This effort is supported by the internal supporting factors that encourage empowerment in the form of soybean industry: Raw materials are still available to support the sustainability of production and a lot of skilled labor and easily trained to maintain and develop the soybean industry; and external support factors that encourage empowerment in the form of soybean industry: tourism sector is large enough towing industry to develop the business, because soybean industry is one that is also closely related to the tourism sector. In the process of empowerment in order to improve the competitiveness is also not free of obstacles, such as: internal inhibiting factors limited capital which is small businesses will hamper business development.

Key words: *community development, small industry and local government*

ABSTRAK

**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL PENGUSAHA TEMPE”
(Studi Tentang Implementasi Undang – Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang
Usaha Kecil di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat)**

SRI MULYANA
Universitas Terbuka
srimulyana64@gmail.com

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai aktor dalam memfasilitasi proses pemberdayaan pengusaha tempe telah menjalankan peran sebagai agen pembangunan. Namun dalam kenyataannya, bantuan atau peran yang diinginkan oleh pengusaha industri tempe dari pemerintah untuk bisa membantu dan membimbing mereka supaya lebih mandiri, belum bisa maksimal dan belum semua pengusaha industri tempe bisa merasakannya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah baru pada tindakan kesempatan berusaha dan peluang usaha dalam rangka pengembangan usaha industri tempe. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena dinamika sosial ekonomi masyarakat Madurejo dalam menggerakkan industri tempe.

Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan industri kecil. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian mengenai diketahui bahwa peran Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM dalam pemberdayaan industri tempe agar dapat meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan beberapa upaya sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Upaya ini didukung oleh faktor pendukung internal yang mendorong pemberdayaan industri tempe berupa: Bahan baku yang masih cukup tersedia menunjang keberlanjutan produksi serta banyak tenaga kerja terampil dan mudah dilatih untuk mempertahankan serta mengembangkan industri tempe; serta faktor pendukung eksternal yang mendorong pemberdayaan industri tempe berupa: Sektor pariwisata merupakan industri penarik yang cukup besar untuk mengembangkan usaha, karena industri tempe merupakan salah satu yang juga berkaitan erat dengan sektor pariwisata.

Dalam proses pemberdayaan agar dapat meningkatkan daya saing juga tidak lepas dari berbagai hambatan, antara lain: faktor penghambat internal berupa keterbatasan permodalan yang dimiliki para pengusaha kecil akan menghambat pengembangan usaha. Sedangkan faktor penghambat eksternal berupa: keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai program pemberdayaan bagi industri tempe, mengakibatkan tidak semua program pemberdayaan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh para pengusaha kecil; ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran yang belum memadai juga menghambat dalam pemberdayaan industri tempe, karena untuk mengenalkan produk yang dibutuhkan sarana yang layak dari segi infrastruktur, selain itu informasi yang berkaitan dengan peluang pasar luar negeri masih sedikit diterima oleh para pengusaha.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, industri kecil dan pemerintah daerah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe,
Pamulang, Tangerang Selatan
15418

Telephone : (021) 7490941
(021) 7490147
(021) 7434290

E-Mail : info@p2m.ut.ac.id
Homepage : <http://www.ut.ac.id>

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul;
**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL PENGUSAHA TEMPE”** (Studi Tentang Implementasi
Undang – Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil di Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat), adalah
hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang
berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bahan
selanjutnya.

Jakarta,

2014

Yang Menyatakan,



Hj. Sri Mulyana
Hj. SRI MULYANA, SE
NIM. 018788181

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN

N A M A : **SRIMULYANA, SE**
N I M : **018788181**
PROGRAM STUDI : **Magister Administrasi Publik**
Judul TAPM : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL PENGUSAHA
 TEMPE (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 5
 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil di Kelurahan Madurejo
 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 Adminastrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : **Sabtu, 23 Agustus 2014**
W a k t u : **12.20 WIB s/d selesai**
 dan telah dinyatakan **LULUS**

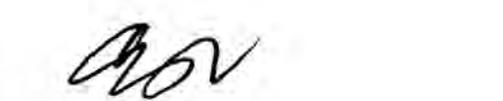
Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
Prof.Dr.Holten Sion,M.Pd

Penguji Ahli
Prof. Dr. ARIES DJAENURI, MPA

Pembimbing I
Dr. SITI ROCHMAH, M.Si

Pembimbing II
Prof.Dr. EDDY LION, M.Pd

: 
 : 
 : 

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL PENGUSAHA TEMPE (Stud Tentang Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)**

Penyusun TAPM : **SRI MULYANA, SE**

NIM : 018788181

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu /23 Agustus 2014

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. SITI ROCHMAH, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001



Prof.Dr. EDDY LION , M.Pd
NIP. 19541016 197803 1 002

Penguji Ahli,



Prof.Dr. ARIES DJAENURI, MPA

NIP. 19470401 196805 1 001

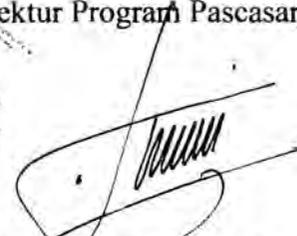
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Alamiien kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan karunia dan iradah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Mandiri (MAPU 5304) ini. Adapun judul Tugas Mandiri saya adalah: **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL PENGUSAHA TEMPE” (Studi Tentang Implementasi Undang – Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semseter III Magister Administrasi Publik dan Birokrasi Program Pascasarjana pada Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan tulisan ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Keberhasilan penulis pada proses akademis yang dijalani tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak DR. SITI ROHMAH, M.Si, selaku pembimbing penulisan I
2. Bapak Prof. DR. EDDY LION, M.Pd, Selaku pembimbing penulisan II
3. Bapak Prof. DR. HOLTEN SION, M. Pd, selaku Kepala UPBJJ Palangka Raya yang telah banyak memberikan keleluasaan bagi mahasiswa PPs MAP untuk berkreasi.
4. Bapak Prof. DR. BONAVENTURA NGARAWULA, M.Si, Prof. DR. H. AGUS SOLEHUDIN. M.Si dan DR. IMAM HANAFI, M.Si, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis.
5. Sdri. STEFANIE MADE AYU, AK. M. Si, yang telah memberikan berbagai bantuan terutama untuk kelancaran proses tutorial hingga penyelesaian tugas studi mandiri ini.

6. Suamiku serta Anak – anakku yang selalu taat dan patuh serta setia mendampingi.
7. Orang Tuaku yang selama ini terus mengiringi setiap langkahku dengan doa.
8. Saudara – saudaraku yang selalu mendukungku.
9. Semua sahabat, kolega, rekan dan pihak yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian studi ini.

Akhir kata semoga Tuhan YME memberikan rahmat-Nya membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu serta dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ini bukan satu – satunya ungkapan yang harus disetujui, namun justru terbuka untuk diteliti, dikaji dan dikritik. Tiada gading yang tak retak, penulis harapkan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini.

Pangkalan Bun, Agustus 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan Anti Plagiat	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Persetujuan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	16
B. Kajian Terdahulu	42
C. Kerangka Berfikir	45
D. Operasional Konsep	49
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Narasumber	55
D. Instrumen Penelitian	55
E. Prosedur Pengumpulan Data	59
F. Metode Analisis Data	61
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Umum Wilayah	65
B. Hasil Penelitian	72
C. Pembahasan	103
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
 Daftar Pustaka	 128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti memberi tempat terhadap hakiki manusia pada posisi sentral. Dilihat dari kerangka yang demikian, pembangunan yang terbesar pada manusia (*people centered development*), yang memandang manusia sebagai warga masyarakat baik sebagai fokus utama pembangunan maupun sebagai sumber utama pembangunan.

Sondang P. Siagian (1991) menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ibnu Syamsi (1986) menyatakan pembangunan merupakan proses perubahan sistem direncanakan dan pertumbuhan menuju kearah perbaikan yang berorientasi pada modernitas, *nation building* dan kemajuan sosial ekonomi.

Dari pengertian pembangunan tersebut, jelaslah suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah didalamnya serta dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan dalam rangka pembinaan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menjadi dasar bagi sistem perekonomian nasional dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Untuk itu perlu memberikan perhatian dan membuka kesempatan lebar bagi usaha yang berpihak pada ekonomi

kerakyatan.

Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan yang berkesinambungan untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1997 lalu. Kejadian tersebut menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia untuk selalu waspada dan matang dalam membuat kebijakan pembangunan guna menciptakan fondasi perekonomian yang kuat dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang merata dan diimbangi dengan kehidupan sosial, dan politik yang demokratis dan berkeadilan.

Struktur perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Diantara ketiganya, pulau Jawa masih menduduki peringkat pertama mobilitas perekonomian. Dari pulau Jawa ini secara khusus daerah DKI Jakarta merupakan daerah perekonomian yang paling tinggi perkembangannya dibanding daerah lain. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama guna menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Komitmen yang kuat ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun rencana pemberdayaan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

UMKM pada umumnya berbasis sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, sehingga pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM dan koperasi telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Berdasarkan data BPS, jumlah UMKM pada tahun yang sama sebanyak 48,9 juta unit atau sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.

Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,2 persen. Berdasarkan data ini tergambar bahwa UMKM merupakan andalan masyarakat dalam menopang perekonomian mereka. Disamping itu, UMKM terbukti dapat membantu pemerintah dalam upaya menyediakan lapangan kerja. UMKM bergerak hampir di semua sektor ekonomi dan berlokasi di seluruh daerah. Khusus usaha berskala mikro dan kecil, masih berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Namun peran atau kontribusinya tidak kalah penting dalam menunjang perekonomian nasional.

Dalam rangka meningkatkan laju perekonomian, tatanan ekonomi Indonesia seharusnya diberi landasan yang kukuh, diantaranya dengan menciptakan ekonomi pasar yang sehat dan monopolistik Belajar dari pengalaman yang tidak sehat dari Orde Baru, maka usaha membangun masyarakat yang mengandung relevansi emansipatoris hanya dapat dilakukan jika turut memasukkan upaya pemberdayaan masyarakat, bukan saja memerangi kemiskinan dan kesenjangan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih aktif, penuh inisiatif dan mandiri menuju Indonesia baru.

Pemberdayaan (*empowerment*) pada awalnya timbul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan (Soetrisno, 1995). Paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Kritik yang dikemukakannya adalah bahwa paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dari kelompok mereka sendiri. Model sentralistik tersebut tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pembangunan yang menyangkut pemilihan pejabat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan salah satu strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan berupaya untuk mengubah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan

program pembangunan yang mereka pilih sendiri (Loekman Soetrisno, 1995)

Wujud pembangunan masyarakat yang demikian akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi dan lebih menjamin tumbuhnya *self sustaining capacity* masyarakat menuju *sustained development*. Oleh karena itu pembangunan masyarakat yang bersumber pada sumber daya manusia dengan pendekatan derivatifnya yang berbentuk pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas, diharapkan dapat ikut mewujudkan *sustained development* lewat penerapan strategi *empowerment*.

Konsep *empowerment* sebagai konsep alternatif pembangunan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial pengalaman langsung (Friedmann, 1992). Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab *civil society* akan merasa siap diberdayakan lewat issue-issue lokal. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional.

Segecap upaya pembangunan harus sudah didasarkan pada pencapaian pemerataan atas hasil-hasil pembangunan dan sedapat mungkin memperkecil tingkat kesenjangan di masyarakat. Dalam menghadapi liberalisasi ekonomi, dimana perekonomian berfungsi menurut mekanisme pasar, maka pencapaian target-target pemerataan dan memperkecil kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial diharapkan bukan lagi slogan, tetapi sudah merupakan bagian operasional dari setiap kebijakan perekonomian nasional. Hal ini

dicapai dengan upaya mengurangi dampak dari pengaruh liberalisasi perekonomian dunia yang tidak terkendali dengan melalui pendekatan pemberdayaan baik individu maupun kelompok masyarakat merupakan salah satu persyaratan pembangunan nasional.

Di era keterbukaan ekonomi, perlu adanya pemihakan yang tegas dari pemerintah kepada pengembangan ekonomi rakyat, agar ekonomi lemah tidak menjadi korban liberalisasi. Hal ini penting bagi pengembangan kelembagaan yang perkembangannya memungkinkan golongan ekonomi lemah dapat berswada. Pemihakan kepada golongan ekonomi lemah ini dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan (*capacity building*) lembaga usaha kecil dalam rangka memperbesar aksesnya kepada aset produksi terutama tanah modal, mengembangkan insfratruktur yang mendukung kegiatan produksi mereka, pengembangan sumber daya manusia dan keterbukaan akses mereka pada pasar. Kesemuanya itu penting bagi pengembangan kelembagaan yang memungkinkan golongan ekonomi lemah dapat berswadaya. Dengan demikian konteks pemberdayaan usaha kecil adalah peningkatan kemampuan kelembagaan usaha keeil agar dapat tangguh dan mandiri.

Pada tataran inilah dituntut eksistensi administrasi publik sebagai suatu jembatan antara negara dengan masyarakat yang merupakan perantara yang memungkinkan keinginan-keinginan masyarakat tersalurkan ke negara. Banyak tuntutan yang menghendaki kenetralan administrasi publik. Apabila administrasi publik tidak dapat netral dan memihak, maka seyogyanya administrasi negara memihak kepada kepentingan rakyat.

Asumsi yang mendasari pemikiran ini adalah jika tidak dimulai dari sekarang keberpihakan administrasi publik pada kepentingan rakyat, maka kondisi yang ada pada saat ini tidak akan lebih baik dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi lebih parah kondisinya. Artinya selama ini keberpihakan administrasi publik yang hanya menguntungkan kepentingan kelompok pengusaha besar ternyata tidak dapat mewujudkan keberhasilan dan pemerataan pembangunan di segala bidang, bahkan kecenderungannya menimbulkan kesenjangan yang begitu besar.

Bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri bahwa pengusaha besar yang selama ini mendapat keuntungan dari keberpihakan administrasi negara kepadanya tidak dapat membendung badai krisis ekonomi sehingga banyak pengusaha besar yang berguguran. Sebaliknya pengusaha kecil yang selalu terpinggirkan oleh administrasi negara menunjukkan ketangguhannya dan dapat bertahan dari krisis ekonomi dan bahkan tidak sedikit yang memperoleh keuntungan pada saat krisis ekonomi melanda.

Dengan demikian wajar kiranya pemerintah yang baik (*good governance*) diharapkan eksistensinya dalam mengkoordinir segala kepentingan rakyat. Peran negara yang sebelumnya sebagai aktor pembangunan bersifat sentralistik, sudah sepatutnya bergeser sebagai agen pembangunan (*development agent*) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Industri kecil/kerajinan rakyat di Kelurahan merupakan kelompok masyarakat ekonomi lemah. Mereka bukan hanya lemah dalam akses modal, manajemen usaha, sumber daya manusia, pemasaran produk, tetapi juga lemah dalam akses pembinaan dan pengembangan baik dalam aspek institusi kelembagaan, pembinaan, pengembangan dan fasilitas alokasi kredit Swasono (1998) mengemukakan bahwa perekonomian rakyat harus dimengerti sebagai aktivitas yang seluruh proses kegiatannya diselenggarakan oleh rakyat secara informal maupun tradisional, di kelurahan maupun perkotaan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada persyaratan khusus yang dituntut hanya keuletan, tekun dan bersedia melakukan pekerjaan, baik bagi wanita maupun pria.

Menurut Kartasmita (1996), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat secara praktis merupakan upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat akan berakibat meningkatkan produktivitas rakyat. Sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan rakyat dapat pula ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Pada akhirnya rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian pemberdayaan tidak saja menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Pemberdayaan usaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Diakui bahwa pemberdayaan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Berdasarkan laporan Bank Dunia Tahun 1993 (dalam Sumodiningrat, 1998), yang berjudul *Industrial Policy Shifting in to High Gear*, menyimpulkan beberapa permasalahan struktural industri Indonesia. Pertama, tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan, dan pasar yang diproteksi. Kedua, dominasi kelompok bisnis pemburu rente (*rent-seeking*) ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Ketiga, lemahnya hubungan intra industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis, yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. Keempat, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. Kelima, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Keenam, investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik (*inward oriented*) dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang diproteksi.

Mengkaji dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka industri kecil dan kerajinan rumah tangga merupakan salah satu usaha kecil adalah bentuk perekonomian rakyat yang apabila diberdayakan akan mampu memecahkan masalah-masalah dasar pembangunan Indonesia seperti pengangguran, juga mampu membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, peran industri kecil dalam menciptakan proses industrialisasi yang berkesinambungan, yakni proses industrialisasi yang tidak menciptakan ketergantungan industri-industri yang tercipta terhadap pasar luar negeri.

Dengan kata lain, industrialisasi yang berkesinambungan harus ditunjang dengan pasar lokal yang kuat. Berkembangnya industri kecil yang banyak tersebar di daerah-daerah akan mampu menaikkan daya rakyat yang merupakan (pendukung potensial) pasar dalam negeri. Pembangunan sektor industri di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan jumlah unit usaha baik untuk kelompok industri kecil yang telah memberikan dorongan tersendiri terhadap penyediaan kawasan-kawasan industri yang dikelola oleh sektor swasta. Perkembangan nilai produksi di Kalimantan Tengah sangat menggembirakan terutama peningkatan yang sangat pesat pada kelompok industri kecil yang ternyata memberikan andil yang sangat besar terhadap perkembangan nilai produksi secara keseluruhan ekspor industri. Ekspor andalan Kalimantan Tengah adalah kayu prosesan, plywood, produk rotan dan CPO.

Dengan makin berkembangnya pembangunan industri di Kalimantan Tengah, telah pula memberikan dampak berkembangnya industri-industri kecil di daerah-daerah, sehingga peranan industri kecil untuk mendukung pembangunan di Kelurahan semakin diandalkan. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh semakin meluasnya pemasaran hasil-hasil industri kecil dan bahkan dapat memasuki pemasaran ekspor. Pada sektor industri khususnya sub sektor industri kecil yang mengemban misi pemerataan dengan sasaran memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah yang utamanya tinggal di Kelurahan diarahkan mampu menjadi salah satu pendorong dalam pembangunan perekonomian Kelurahan, melalui peningkatan pembinaan terpadu Kelurahan kerajinan, yang sekaligus sebagai bagian dari sistem UDKP yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Bertitik tolak dari perkembangan ekonomi Kalimantan Tengah diatas ternyata telah menunjukkan adanya kerangka yang lebih jelas kearah industrialisasi sesuai dengan arah yang telah disepakati secara nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah yaitu industri yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh dan ini berarti telah menunjukkan adanya transportasi dari sektor pertanian kearah industri. Tempe produksi Madurejo tidak hanya dikenal oleh masyarakat Kecamatan Arut Selatan, tetapi sudah terkenal di Kabupaten Kotawaringin Barat bahkan ke kabupaten - kabupaten sekitarnya. Namun pada perkembangannya juga mengalami terpaan krisis ekonomi yang mengakibatkan biaya produksi meningkat tajam, meningkatnya harga bahan baku, namun harga jual produk tidak meningkat.

Pada awalnya terjadi penurunan produksi karena permintaan turun, tetapi tidak beberapa lama terjadi peningkatan permintaan, yang secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan produksi.

Kini rakyat Indonesia sedang menghadapi persoalan pelik terkait dengan langkanya tahu dan tempe. Bahkan, masyarakat yang menjadikan tahu dan tempe sebagai makanan sehari-hari menjadi kelimpungan. Karena sebagian besar produsen tahu dan tempe seperti di kota Pangkalan Bun dan beberapa kota lainnya menghentikan produksi akibat tingginya harga kedelai. Kalau pun masih ada, mungkin harganya sudah sangat tinggi atau bahkan mereka mengurangi pegawainya.

Seperti misalnya, di Kota Pangkalan Bun, menurut pemantauan peneliti, nyaris di semua sudut pasar sudah tidak ada lagi tahu dan tempe. Di Pasar Baru, dan Pasar SAIK, hampir tidak ada pedagang yang menjualnya. Konon respon pemerintah dalam menanggapi keluhan para produsen tempe akan membebaskan bea impor kedelai sebesar 5% yang berlaku hingga akhir tahun ini. Dengan pembebasan bea itu, harga kedelai akan turun sekitar Rp400 per kg. Suatu penurunan yang tidak signifikan sebenarnya, dibanding harga yang sebelumnya Rp 5500 terus menjadi Rp 8000. Dan itu juga hanya penyelesaian jangka pendek saja. Apa kita mau puasa tempe lagi tahun depan.

Sungguh suatu ironi di negara yang tanah pertaniannya terbentang luas, kita masih mengimpor kedelai sekitar 1 juta ton, karena produksi dalam negeri hanya mampu menghasilkan sekitar 700 ribu ton. Sementara kebutuhan kedelai Indonesia mencapai 2.2 juta ton. Dan impor ini sudah berlangsung lama, bahkan gencarnya sejak adanya krisis finansial tahun 1998 karena ada kesepakatan

dengan IMF. Kita diminta untuk membuka kran impor kedelai dengan mengurangi tarif bea masuk dari yang tadinya 20% menjadi 5%

Memang sulit kalau kita sudah tergantung pada negara lain. Sedikit terjadi kegoncangan saja, baik harga maupun karena musim, kita terus kalang kabut dibuatnya. Guncangan harga kedelai yang nyaris tidak pernah stabil sudah menjadi peristiwa rutin tahunan bagi kalangan pengrajin tahu-tempe. Kenaikan harga kedelai ini menjadi siklus yang sangat tidak menguntungkan, baik bagi produsen maupun konsumen. Harga kedelai yang mencapai Rp 8.000 per kilogramnya dirasakan sebagai mesin pelumpuh usaha rakyat. Akibatnya beberapa perajin tempe yang tidak kuat modal sudah gulung tikar lebih dulu dan beralih profesi lain.

Bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke atas dan tinggi, banyak solusi yang bisa mereka lakukan. Katakanlah berapa pun harganya mereka mampu beli. Tapi bagi rakyat kecil dan kebanyakan, kehilangan penghasilan dari tempe merupakan suatu hal yang sangat berarti. Disamping harganya yang murah meriah, gizinya juga tinggi bahkan tidak berkolesterol lagi. Itulah sebabnya kalau nafas kita sangat tergantung pada kedelai impor.

Dalam kebijaksanaan pembangunan sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta diupayakan terkait serta menunjang unggulan utama sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai aktor dalam memfasilitasi proses pemberdayaan pengusaha tempe telah menjalankan peran sebagai agen pembangunan. Namun dalam kenyataannya, bantuan atau peran yang diinginkan oleh pengusaha industri tempe dari pemerintah untuk bisa

membantu dan membimbing mereka supaya lebih mandiri, belum bisa maksimal dan belum semua pengusaha industri tempe bisa merasakannya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah baru pada tindakan kesempatan berusaha dan peluang usaha. Sedangkan dari sektor swasta mempunyai peranan yang tinggi dalam rangka pengembangan usaha industri tempe khususnya dalam bidang permodalan dan pemasaran.

Mencermati fenomena dinamika sosial ekonomi masyarakat Madurejo memunculkan pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana berlangsungnya perkembangan keberdayaan masyarakat tersebut? Apakah karena unsur luar masyarakat Madurejo yang mendorong terjadinya perkembangan tersebut, ataukah karena faktor dari dalam masyarakat yang memang ingin mengembangkan diri? Mengapa krisis ekonomi tidak memberikan pengaruh banyak terhadap eksistensi usaha pengrajin tempe di Madurejo? Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut .

- a. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberdayakan pengusaha industri kecil tempe di Kelurahan Madurejo kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat?
- b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan Industri Keripik Tempe Agar Dapat Meningkatkan Daya Saing pengusaha industri tempe Madurejo kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan pemberdayaan pengusaha industri kecil tempe Madurejo.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan kendala pemberdayaan pengusaha industri kecil tempe Madurejo.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah khususnya bidang pemberdayaan masyarakat. Kontribusi ini dapat menawarkan konsep pembangunan yang berdimensi kerakyatan, pembangunan yang berorientasi pada manusia, pembangunan berkelanjutan dan lebih mengutamakan pembangunan ekonomi rakyat kecil, serta pengembangan pola dan konsep pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.
- b. Secara Praktis, menjadi masukan bagi pengusaha industri kecil kayu tempe Madurejo dalam mengembangkan cara atau strategi pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat mandiri dan berdaya, serta masukan bagi para pengambil kebijakan pemerintah dalam mengembangkan proses dan model pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi Pembangunan

a. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu: *pertama*, tentang administrasi dan *kedua*, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari dua definisi diatas maka disimpulkan bahwa Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (S. P. Siagian, 1983: h.2,3,4)

b. Aspek-Aspek yang Saling Mempengaruhi Administrasi Pembangunan.

1. Aspek Politik

Aspek politik dalam perkembangan masyarakat atau negara erat sekali hubungannya dengan administrasi pembangunan. Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini

juga berhubungan dengan interdependensi antar sistem politik yang dianut oleh administrasi pembangunan. Yang kedua adalah komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sesungguhnya terhadap usaha yang saling berkait antar berbagai segi kehidupan masyarakat.

Ketiga, masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik. Keempat, perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan. Kelima, hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik dengan birokrasi. Keenam, aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan politik di luar negeri yang sering kali merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

2. Aspek Ekonomi.

Demikian pula terdapat hubungan yang erat antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan atau pembinaan bangsa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Negara-negara baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena perbedaan yang menyolok dalam tingkat pertumbuhan antar negara adalah di bidang ekonomi. Demikian pula kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pada negara-negara tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat, diharapkan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain. Pertumbuhan ekonomi akan dapat berhasil tidak hanya dari kegiatan-kegiatan atau program-program ekonomi saja, tetapi dari hubungan timbal balik kebijaksanaan politik, sosial dan lain-lain yang konsisten. Administrasi pembangunan dalam hal ini dapat mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan. Aspek ekonomi lain yang penting yang perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis.

3. Aspek Sosial-Budaya

Berbagai aspek sosial-budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya, haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Administrasi pembangunan perlu memberikan perhatian utama

kepada usaha-usaha menanggulangi keadaan sosial masyarakat negara-negara baru berkembang seperti pembinaan sumber-sumber manusia. Dalam hal ini termasuk pengembangan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan, kesehatan, tingkat gizi, fasilitas perumahan. Tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap masalah kesejahteraan anak, partisipasi pemuda dalam proses pembangunan, peran wanita dalam perubahan sosial-ekonomi yang menyeluruh.

4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik.

Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pembangunan ilmu dan teknologi. Administrasi pembangunan perlu memberikan sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi. Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian kebijaksanaan negara/pemerintah memberi perhatian terhadap prospek masa depan, berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup (Tjokroamidjojo, 1974)

2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan sumber daya aspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di Negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai

asumsi bahwa “pembangunan akan berjalan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat”.

Menurut Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa Pemberdayaan berarti untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan Bryant dan White (1987), mengemukakan bahwa Pemberdayaan adalah pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Pengertian lain tentang Pemberdayaan dari Freire (sebagaimana dikutip Loekman Soetrisno, 1995), bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang menindas (*opressive*). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Moechtar Mas'ood (1994), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Bertolak dari fenomena tersebut Friedmann (1992), menawarkan strategi pembangunan yang populer disebut dengan mengemukakan bahwa hasil interaksi pada tingkat ideologi antara konsep *growth strategy* dan *people centered* akan melahirkan konsep “*empowerment*” atau yang lebih akrab disebut dengan pemberdayaan. Konsep ini muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan dalam artian gagalnya model-model

pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan ini, bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan cerminan nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan semakin terasa pada tingkat individu dan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Sebagai konsep alternatif pembangunan, *empowerment* memberi tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, secara langsung melalui partisipasi demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas. Dengan asumsi bahwa *civil society* siap memberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* diabaikan, karena pemberdayaan tidak semata-mata di bidang ekonomi, tetapi juga secara politik, sehingga masyarakat akan memiliki "*bargaining ision*" secara nasional ataupun internasional.

Konsep pemberdayaan ini merupakan hasil dari proses interaktif di tingkat ideologi dan praktis. Di tingkat ideologis, merupakan hasil interaksi antara konsep "*top down*" dan "*bottom up*" antara "*growth strategy*" dan "*people centered strategy*". Di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep ini tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi bagaimana mensinergikan keduanya. Konsep ini bertitik tolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk terjadinya

pertumbuhan, serta memungkinkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kirdar dan Silk (seperti dikutip Kartasasmita, 1996) menyebutkan dengan *the pattern of growth is just as important as the rate of growth*. Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat "*people centered, participatory, empowering and sustainable*" (Chambers, 1997). Asumsi dasar yang dipergunakan bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya, menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan pemberdayaan dirinya. Kalau selama ini yang bersangkutan tidak berdaya, bisa jadi yang menghalangi upaya tersebut. Dengan adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, maka dengan sendirinya bisa meningkatkan keswadayaan dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kekurangan yang dialaminya (Korten, 1993).

Memperhatikan uraian diatas maka pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan *people centered, participatory, empowering and sustainable* dengan asumsi dasarnya bahwa setiap manusia memiliki potensi, daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik; karena pada dasarnya manusia bersifat aktif dalam setiap upaya dapat mengandung arti mengembangkan, memandirikan, meswadayakan da memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Priyono dan Pranarka, 1996 dalam Sedarmayanti, 2000)

Konsekuensinya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya difokuskan kepada perbaikan pada tingkat individual, melainkan juga pada tingkat di luar individu. Karena unit analisis penelitian ini adalah rumah tangga yang merupakan akumulasi dari para individual, maka alur pikiran penelitian ini menjadi pemahaman persoalan kemiskinan tidak hanya sebatas dalam rumah tangga (individu-individu dalam rumah tangga), tetapi juga persoalan-persoalan di luar rumah tangga, akibatnya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu perbaikan pada tingkat rumah tangga, melainkan juga perbaikan hal-hal yang berada di luar rumah tangga.

Terjadi perubahan strategi pengentasan kemiskinan akhir-akhir ini. Pada awalnya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara negara atau agen-agen donor memberikan bantuan modal dalam berbagai bentuk kepada penduduk miskin untuk membuat mereka dapat merubah kondisi ekonominya. Strategi pengentasan kemiskinan seperti ini didasarkan kepada teori yang memandang orang miskin sebagai terget yang pasif dan dengan bantuan luar persoalan kemiskinan mereka dapat dipecahkan (Martinussen 1997, hal. 297). Kemudian, disadari bahwa orang miskin tidak hanya mengalami persoalan ketiadaan modal, tetapi juga kerentanan dan ketidak berdayaan (Chambers seperti yang dikutip oleh Soetrisno 1995, hal. 19). Seiring dengan bergesernya pemahaman mengenai hakekat kemiskinan, strategi penting yang kemudian dilakukan adalah memberdayakan rumahatangga miskin dengan berbagai cara yang dapat digolongkan sebagai *capacity building*.

Strategi pemberdayaan anggota rumahtanga miskin dengan pendekatan *capacity building* hanya bertumpu pada perbaikan pada tingkat individual dan rumahtangga. Cara lain yang perlu dilakukan adalah dengan menyentuh komunitas tempatan, dengan cara menggunakan institusi lokal yakni mekanisme jaminan sosial yang hidup di dalam komunitas tempatan untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis institusi komunitas setempat (Ancok 1995, hal.167-8, Santoso, dkk., 2003, dan Muttaqin 2005).

Ada dua strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis komunitas tempatan yang dapat dilakukan. Pertama, strategi pemberdayaan rumahtangga. Rumahtangga miskin di perdesaan maupun perkotaan dengan potensi yang dikuasainya mengatasi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Strategi utama biasanya adalah dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga: pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya wanita berperanan ganda, selain terlibat dalam kegiatan reproduksi yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, juga terlibat dalam kegiatan produksi yang langsung menghasilkan pendapatan. Pada rumahtangga lapisan bawah atau miskin seringkali peranan wanita mencari nafkah (produksi) lebih nyata dibanding pada rumah tangga lapisan menengah dan atas yang lebih kaya (Hull 1976, Hart 1986 dan Sitorus dkk., 1992).

Keterlibatan akses sumber daya ekonomi, dalam hal ini tanah dan modal, menyebabkan rumah tangga miskin di pedesaan berupaya memanfaatkan potensi tenaga kerja yang rasional. Konsolidasi tenaga kerja dalam strategi alokatif rumah tangga miskin itu sangat ketat (Hart 1986). Dalam strategi ekonomi rumahtangga miskin pedesaan misalnya, wanita seperti juga pria biasanya memiliki peran yang sangat penting sebagai pencari nafkah di bidang pertanian maupun non-pertanian.

Hal ini berarti, memberdayakan anggota rumahtangga yang laki-laki sama pentingnya dengan memberdayakan anggota rumahtangga yang perempuan. Kedua, strategi pengentasan kemiskinan yang bertumpu kepada kekuatan komunitas tempatan itu sendiri dalam arti kata menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di dalam komunitas tersebut untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal ini dapat dilakukan disebabkan oleh upaya mengatasi kemiskinan juga dilakukan oleh komunitas tempatan itu sendiri semenjak lama. Di kalangan rumahtangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan biasanya juga ada pertukaran atau konsolidasi sumberdaya antar rumah tangga, baik itu rumahtangga lapisan maupun antar lapisan. Di Sumatera Barat, pertukaran itu terjadi secara intensif antara anggota kekerabatan (Afrizal 1996 dan 1997). Strategi yang dapat dilakukan adalah melembagakan tradisi ini untuk mengentaskan kemiskinan, seperti orang kaya lokal membantu orang miskin setempat untuk permodalan dan sebagainya (Hikmat 2003, hal. 47).

Dalam hal ini, menjadi relevan untuk mengaitkan strategi pengentasan kemiskinan dengan konsep konsep energi sosial-budaya kreatif, suatu kekuatan internal pada tingkat lokalitas (komunitas) seperti nagari, jorong, kampung dan kelompok ketetangaan ataupun kewargaan. Konsep energi sosial kretatif ini

menunjuk pada tiga aspek, yaitu: (a) gagasan (*ideas*) dasar yang disepakati tentang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita (*ideal*) yang disepakati tentang wujud mencapai tujuan itu, dan (c) kebersamaan (*friendship*) dalam upaya mencapai tujuan itu (Uphoff 1990 dan Sitorus dkk., 1992). Energi sosial itu terdapat pada satuan lokalitas dalam bentuk pranata-pranata yang berorientasi pada kesejahteraan bersama yang telah dijelaskan sebelumnya.

Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang luas dan cukup banyak ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya, hanya saja satu dan yang lainnya berbeda dan sangat dipengaruhi oleh “*interlinking factors*” antara lain pengetahuan, kemampuan status, harta, kedudukan, jenis kelamin. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Pola hubungan seperti inilah yang akan diperbaiki dalam proses pemberdayaan.

Prijono (1996) melihat proses pembangunan memiliki kecenderungan :

1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian, melalui organisasi dan biasa disebut kecenderungan primer.
2. Sebagai proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan. Untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dan diskusi dalam organisasi / kelompok secara bersama. Disini terjadi proses konsientisasi dengan cara menganalisis secara kritis situasi total mereka, termasuk

melihat dimensi politiknya dan berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi tersebut melalui aksi kolektif. Artinya, kaum miskin mulai belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan biasa disebut kecenderungan sekunder.

Moeljarto (1993), menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses pematihan (*break down*) dari hubungan atau relasi subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya "pengakuan" subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Pemberian kuasa atau kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut.

Menurut Mubyarto (1994), menyatakan bahwa pada hakekatnya inti dari pemberdayaan berada pada diri manusia / rakyat. Faktor luar hanyalah berfungsi sebagai perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan, mengendalikan, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) Inisialisasi, dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat, (2) Partisipatoris, dari pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat dan (3) Emansipatoris, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Priyono dan Pranarka, 1996). Pada tahapan ketiga emansipatoris, masyarakat sudah dapat menemukan eksistensi diri sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya, untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan 2 (dua)

persyaratan pokok yaitu (1) Perencanaan pembangunan dan (2) pelaksanaan program pembangunan.

Sedangkan dalam perencanaan pembangunana yang melibatkan langsung peran serta masyarakat dikenal beberapa metode yaitu :

1. Metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*. Metode ini dilaksanakan dengan menggali informasi terhadap hal yang telah terjadi. Kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung . Semua informasi tersebut diolah tim untuk kemudian diumpam balikan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaanya.
2. Metode *Capicapotory Rural Appraisal (PRA)*. Metode ini sebagai metode pendekatan belajar tentang kondisi dari kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa sendiri. Tujuan utama metode ini adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan kemampuan masyarakat dengan mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan perencanaan dan tindakan (Chambers, 1997)

Pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat menurut Kartasmita (1996) harus memiliki ciri antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah.
2. Pelaksanaanya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang akan dilakukan.
3. Karena masyarakat yang lemah sulit bekerja sendiri-sendiri akibat dari ketidak berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperative*) dalam kelompok

yang dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.

4. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan social, termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa suatu perencanaan pembangunan dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pemberdayaan masyarakat hendaknya bersifat *bottom-up*. Karena masalah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, sehingga dialah yang harus memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Hal ini selaras dengan yang diungkap Korten (1988) bahwa proses pembuatan keputusan harus benar-benar dikembalikan kepada rakyat, yang mempunyai kapasitas maupun hak untuk memasukkan ke dalam proses pengambilan kebijakan segala kekayaan dan kebutuhannya.

Schumaker (1973) dalam proses pemberdayaan masyarakat lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan politik. *Economic development can succeed only if it is carried forward as a hoard popular "movement reconstruction" with the primary emphasis on the full utilization of the drive, enthusiasm intellegence and labor power of everyone.*

Sedangkan strategi yang paling tepat adalah dengan memberi mereka sarana untuk mengembangkan diri, lebih lanjut Schumaker mengemukakan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat NGO (*Non Governmental Organization*) memiliki tempat yang istimewa, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan kelompok mandiri.

Suatu perencanaan pembangunan yang memiliki karakter pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada kebijakan strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi dasar tersebut mempunyai tiga arah (Sumodiningrat, 1999), yaitu

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan didaerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.
3. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahanstruktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat local.

Senada dengan pendapat tersebut diatas, Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dari tiga arah yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan
3. Melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah, mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Lebih lanjut Kartasmita (1996) mengemukakan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan yaitu :

1. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targeted) atau pemihakan kepada yang miskin/lemah;
2. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama;
3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping, yang sifatnya local, teknis dan khusus.

Strategi dan pendekatan pembangunan tersebut mengfokuskan pada keunggulan potensi untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan dengan member kekuatan, kesempatan dan kekeluargaan individu, kelompok sasaran local, masyarakat serta struktur kelembagaan (*capacity, capability and institutionally locally*) agar berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Hal ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi pemerintah. Pendekatan ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi pemerintahan. Karena birokrasi pemerintahan dalam pelayanan public lebih berperan dan melakukan fungsi sebagai “ *steering organization*” ketimbang sebagai “ *rowing organization*” untuk menjamin tumbuhnya “ *self sustaining capacity*” masyarakat menuju “ *sustained development*” seperti yang disarankan Osborne dan Gaibler, 1992 (Supriyatna, 2000).

3. Industri Kecil

Ekonomi kerakyatan di Indonesia pada umumnya mengacu pada sila ke empat Pancasila yang mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Konsep demokrasi merupakan sebuah konsep yang sangat menonjolkan unsur kerakyatan yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan tidak berbeda jauh dengan apa yang dimaksudkan dengan istilah demokrasi ekonomi, sebagaimana penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang - undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Produksi dikerjakan oleh semua, dibawah pimpinan kepemilikan anggota-anggota masyarakat, perekonomian di Indonesia lebih mengutamakan kemakmuran rakyat dan kemakmuran orang per orang atau kelompok yang disusun atas dasar demokrasi ekonomi”.

Industri menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan daripada Kementerian Perindustrian, yaitu “industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, perubahan perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas”.

Kementerian Perindustrian melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 286/M/SK/10/1989, memberikan kriteria bidang usaha yang termasuk kelompok industri kecil yaitu : pertama, investasi yang mencakup bangunan, mesin dan peralatan dengan seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000, kedua pemilikan usaha adalah warga Negara Indonesia.

Mengingat perekonomian rakyat itu amat penting bagi pembangunan nasional, maka perlu ditumbuhkembangkan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, oleh sebab itu identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh sektor perekonomian tersebut harus dilakukan, untuk kemudian dicari alternatif terbaik untuk penanganannya (Swasono, 1998). Tetapi harus diingat bahwa setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Sudah tentu dalam penanganan identifikasi masalahnya tidak boleh dilakukan secara generalisasi.

Agar mampu mengembangkan potensi industri kecil, terlebih dahulu harus dipahami masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil serta dinamika yang terjadi didalamnya. Pemahaman ini penting agar mampu menciptakan strategi yang tepat guna pemberdayaan dan pengembangannya. Adapun karakteristik usaha kecil (industri kecil) hampir seragam, diantaranya :

- 1). Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi.
- 2). Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal.
- 3). Sebagian besar belum berstatus Badan hukum.

Sedangkan masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah :1) Kelemahan memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan jalur terhadap sumber-sumber permodalan. 3) Lemah dalam bidang organisasi dan manajemen SDM. 4) Keterbatasan sistem informasi pemasaran. 5) Iklim usaha yang kurang kondusif. 6) Pembinaan kurang terpadu dan kurang respon masyarakat terhadap usaha industri kecil.

Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang *concern* dengan pengembangan industri kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang *concern* dengan pengembangan industri kecil. Hanya saja upaya pembinaan usaha kecil yang sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri (Kuncoro, 1997). Kata kunci disini adalah keberpihakan pada perkembangan ekonomi rakyat merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Jika ekonomi rakyat mendapat dukungan secara politik dari pemerintah, niscaya akan muncul kebangkitan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.

Strategi pembinaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan
2. Aspek Teknologi dan Produksi
3. Aspek Pemasaran

4. Permodalan

Pada industri kecil tempe Madurejo, faktor modal mempunyai peranan penting dalam kegiatan produksi. Pengertian modal dalam ekonomi terdiri dari modal kerja dan modal tetap. Yang dimaksud modal kerja adalah modal yang habis dalam sekali pakai. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan biaya dalam bentuk uang baik kas maupun membeli bahan, membayar tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan modal tetap adalah modal / aktiva yang tidak habis dalam sekali pakai, melainkan secara berangsur habis turut serta dalam proses produksi selama periode tertentu.

Kendala utama yang banyak dialami oleh pengusaha industri kecil tenasuk industri tempe Madurejo adalah disektor permodalan. Dengan kondisi modal yang sangat terbatas yang dimiliki oleh pengusaha industri kecil tempe mereka mengalami hambatan dalam pengembangan usaha. Apalagi ditambah dengan kesulitan mereka untuk mengakses tambahan modal dengan mengajukan kredit ke Bank karena tidak adanya legalitas usaha dan tidak adanya agunan atau jaminan serta tidak adanya lembaga penjamin.

Melihat kenyataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyadari bahwa faktor permodalan menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menganggarkan bantuan melalui APBD nya tiap tahun. Konsekuesinya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya difokuskan kepada perbaikan pada tingkat individual, melainkan juga pada tingkat di luar individu.

Karena unit analisis penelitian ini adalah rumahtangga yang merupakan akumulasi dari para individual, maka alur pikiran penelitian ini menjadi pemahaman persoalan kemiskinan tidak hanya sebatas dalam rumah tangga (individu-individu dalam rumahtangga), tetapi juga persoalan-persoalan di luar rumahtangga, akibatnya, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya perlu perbaikan pada tingkat rumahtangga, melainkan juga perbaikan hal-hal yang berada di luar rumahtangga.

Terjadi perubahan strategi pengentasan kemiskinan akhir-akhir ini. Pada awalnya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara negara atau agen-agen donor memberikan bantuan modal dalam berbagai bentuk kepada penduduk miskin untuk membuat mereka dapat merubah kondisi ekonominya. Strategi pengentasan kemiskinan seperti ini didasarkan kepada teori yang memandang orang miskin sebagai terget yang pasif dan dengan bantuan luar persoalan kemiskinan mereka dapat dipecahkan (Martinussen 1997, hal. 297). Kemudian, disadari bahwa orang miskin tidak hanya mengalami persoalan ketiadaan modal, tetapi juga kerentanan dan ketidak berdayaan (Chambers seperti yang dikutip oleh Soetrisno 1995, hal. 19).

Seiring dengan bergesernya pemahaman mengenai hakekat kemiskinan, strategi penting yang kemudian dilakukan adalah memberdayakan rumahtangga miskin dengan berbagai cara yang dapat digolongkan sebagai *capacity building*. Strategi pemberdayaan anggota rumahtanga miskin dengan pendekatan *capacity building* hanya bertumpu pada perbaikan pada tingkat individual dan rumahtangga.

Cara lain yang perlu dilakukan adalah dengan menyentuh komunitas tempatan, dengan cara menggunakan institusi lokal yakni mekanisme jaminan sosial yang hidup di dalam komunitas tempatan untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi ini disebut pengentasan kemiskinan berbasis institusi komunitas setempat (Ancok 1995, hal.167-8, Santoso, dkk., 2003, dan Muttaqin 2005).

Ada dua strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis komunitas tempatan yang dapat dilakukan. Pertama, strategi pemberdayaan rumahtangga. Rumahtangga miskin di perdesaan maupun perkotaan dengan potensi yang dikuasainya mengatasi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Strategi utama biasanya adalah dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga: pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya wanita berperan ganda, selain terlibat dalam kegiatan reproduksi yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, juga terlibat dalam kegiatan produksi yang langsung menghasilkan pendapatan. Pada rumahtangga lapisan bawah atau miskin seringkali peranan wanita mencari nafkah (produksi) lebih nyata dibanding pada rumah tangga lapisan menengah dan atas yang lebih kaya (Hull 1976, Hart 1986 dan Sitorus dkk.,1992).

Keterlibatan akses sumber daya ekonomi, dalam hal ini tanah dan modal, menyebabkan rumah tangga miskin di perdesaan berupaya memanfaatkan potensi tenaga kerja yang rasional. Konsolidasi tenaga kerja dalam strategi alokatif rumah tangga miskin itu sangat ketat (Hart 1986). Dalam strategi ekonomi rumahtangga miskin perdesaan misalnya, wanita seperti juga pria biasanya memiliki peran yang sangat penting sebagai pencari nafkah di bidang pertanian maupun non-pertanian.

Hal ini berarti, memberdayakan anggota rumahtangga yang laki-laki sama pentingnya dengan memberdayakan anggota rumahtangga yang perempuan.

Kedua, strategi pengentasan kemiskinan yang bertumpu kepada kekuatan komunitas tempatan itu sendiri dalam arti kata menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di dalam komunitas tersebut untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan disebabkan oleh upaya mengatasi kemiskinan juga dilakukan oleh komunitas tempatan itu sendiri semenjak lama. Di kalangan rumahtangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan biasanya juga ada pertukaran atau konsolidasi sumberdaya antar rumah tangga, baik itu rumahtangga lapisan maupun antar lapisan. Di Sumatera Barat, pertukaran itu terjadi secara intensif antara anggota kekerabatan (Afrizal 1996 dan 1997). Strategi yang dapat dilakukan adalah melembagakan tradisi ini untuk mengentaskan kemiskinan, seperti orang kaya lokal membantu orang miskin setempat untuk permodalan dan sebagainya (Hikmat 2003, hal. 47).

Dalam hal ini, menjadi relevan untuk mengaitkan strategi pengentasan kemiskinan dengan konsep konsep energi sosial-budaya kreatif, suatu kekuatan internal pada tingkat lokalitas (komunitas) seperti nagari, jorong, kampung dan kelompok ketetanggaan ataupun kewargaan. Konsep energi sosial kreatif ini menunjuk pada tiga aspek, yaitu: (a) gagasan (*ideas*) dasar yang disepakati tentang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita (*ideal*) yang disepakati tentang wujud mencapai tujuan itu, dan (c) kebersamaan (*friendship*) dalam upaya mencapai tujuan itu (Uphoff 1990 dan Sitorus dkk., 1992).

Energi sosial itu terdapat pada satuan lokalitas dalam bentuk pranata-pranata yang berorientasi pada kesejahteraan bersama yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan program peningkatan kemampuan teknologi, pemberdayaan teknologi dan produksi dimaksudkan untuk mendorong agar pengusaha industri kecil mempunyai kemampuan di bidang teknologi sehingga mempunyai kemampuan di bidang teknologi serta lebih mampu dalam peningkatan atau penciptaan nilai tambah sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan produktivitas serta efisiensi dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu faktor produksi yang penting dalam usaha pertempaan adalah keberadaan *pedagang-pedagang* pada sentra industri tempe Madurejo. Dengan *pedagang* tersebut para pelaku dengan mudah memilih barang atau melakukan transaksi jual beli lebih baik lagi jika ditempat untuk memproduksi juga dilengkapi dengan *pedagang*. Sebab jika ada pembeli yang kurang puas dengan produk yang sudah ada dapat memesan produk yang diinginkan.

Para pemilik *pedagang* ini yang langsung berhadapan dengan konsumen, dari pilihan-pilihan konsumen ini, para pemilik *pedagang* mengetahui produk apa yang sedang digemari masyarakat dan produk apa yang sering laku terjual. Bentuk dan model serta desain produk yang digemari ini dan laku terjual ini disampaikan kepada produsen tempe untuk diproduksi lebih banyak. Disamping memasarkan produksi tempe yang dihasilkan oleh pengusaha industri, juga para pemilik *pedagang* menerima pesanan dalam partai besar.

Selanjutnya pemilik *pedagang* tinggal menghubungi produsen tempe untuk memproduksi sesuai pesanan konsumen baik itu dari segi bentuk, model, ukuran dan desain produksi.

4. Kebijakan Dan Strategi Pemberdayaan Pengusaha Industri Kecil

Pemberdayaan Pengusaha industri kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Dalam kenyataan dilapangan banyak dijumpai kendala dalam rangka pemberdayaan pengusaha industri kecil, seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha industri kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Upaya menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat. Selalu dilaksanakan oleh pemerintah yang memang berkewajiban membangun perekonomian masyarakat. Keberpihakan kebijakan pemerintah atas perekonomian kecil (rakyat) dapat dilihat pada masa pemerintahan transisi presiden Habibie, dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No.XVI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, khususnya pasal 5 berbunyi :

“Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.”

Pembangunan dibidang industri kecil yang lebih mengutamakan pemerataan kesempatan kerja perlu untuk lebih ditingkatkan melalui pemberdayaan dan penyempurnaan pengaturan serta pengembangan usaha pengusaha kecil merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dalam Kebijakan Kementerian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat / masyarakat oleh Kementerian Koperasi, pengusaha kecil dan menengah menekankan kebijaksanaan pada .

- 1) Pemilihan produksi dan distribusi pangan;
- 2) Memperbesar akses kredit;
- 3) Penataan Kelembagaan;
- 4) Redistribusi asset;
- 5) Industri berbasis sumber daya;
- 6) Ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 7) Otonomi dengan pengembangan koperasi, pengusaha kecil serta menengah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah memberi penekanan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya seluas-luasnya serta meningkatkan perekonomiannya. Selama ini diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pengembangan pengusaha industri kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern dengan pengembangan industri kecil.

Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : pertama, aspek managerial, yang meliputi : peningkatan produktivitas, omzet, tingkat utilisasi, tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, aspek permodalan, yang meliputi : bantuan modal dan kewajiban menyalurkan kredit bagi usaha kecil dan kemudahan kredit (Kupedes, KUK, KIK, KCK, Kredit Mini, Midi). Ketiga, mengembangkan program kemitraan dengan pasar usaha baik lewat system Bapak Angkat, Anak Angkat, keterkaitan Hulu Hilir (forward linkage), keterkaitan hilir hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak, pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pengembangan Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri). Kelima, pembinaan unik bidang usaha dan daerah tertentu melalui KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

B. Kajian ^{Penelitian} Terdahulu

1. Maximianus Agus Frayudi (1999).

Dalam tesisnya yang berjudul "Faktor - Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Usaha Industri Kecil Kerajinan Bambu di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", dinyatakan bahwa faktor modal usaha, tenaga kerja, pengalaman, curahan jam kerja dan jiwa kewirausahaan secara bersama berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pengrajin industri kecil kerajinan bambu di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pada kenyataannya penyediaan dana untuk

membentuk permodalan pengrajin industri kecil di Kecamatan Minggir dengan persyaratan mudah dan bunga rendah belum ditempuh oleh unsur - unsur pembina dari pemerintah dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan para pengrajin bambu untuk mampu berwirausaha.

2. I Wayan Wisardja (2000)

Penelitian I Wayan W dengan judul "Analisis Lingkungan Industri Kerajinan Ukiran di Kabupaten Gianyar Propinsi Bali". menunjukkan bahwa faktor lingkungan industri yang unsur- unurnya adalah pelanggan, pemasok, pesaing dan teknologi berpengaruh secara bermakna terhadap keberhasilan usaha industri kerajinan ukiran di Kabupaten Gianyar Propinsi Bali. Di sisi lain yang penting dalam mengembangkan industri kerajinan ukiran di Kabupaten Gianyar adalah mempertahankan kemitraa kerjasama yang baik dengan para pemasok bahan baku maupun pelanggan terutama penyeter dengan melibatkan para pengrajin sehingga semua pihak bisa diuntungkan.

3. Unggul (2001)

Dalam penelitian Unggul di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan judul "Pemberdayaan Pengusaha Industri Kecil di Perkotaan", dinyatakan bahwa Pemberdayaan Usaha Kecil di Kelurahan Dinoyo harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan (*capacity building*) usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri serta tumbuh dan berkembang. Usaha industry kecil keramik Dinoyo tidak hanya memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha dan keluarganya akan tetapi tetap juga memberi keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar Dinoyo. Modal usaha merupakan salah satu faktor produksi yang sangat

penting bagi pengusaha industri kecil keramik.

Untuk lebih mengefektifkan pemberdayaan industri kecil keramik yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlu adanya keberpihakan dan kepedulian yang lebih besar dari administrasi publik terhadap pengembangan usaha industri kecil keramik Dinoyo, perlu koordinasi dengan melibatkan instansi terkait dan perlu membentuk lembaga penjamin

4. Eny Raehyuningsih (2001)

Dari hasil penelitian Eny R. dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang", menunjukkan bahwa masyarakat desa Pendem ditinjau dari aspek sosial ekonomi sebagian masyarakatnya berada di tahapan keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera Tahap I, bila ditinjau dari Delapan dasar kekuatan sosial yaitu pertahanan ruang hidup, waktu luang, pengetahuan dan ketrampilan, informasi yang tepat, organisasi sosial, jaringan sosial, sarana dalam pekerjaan dan lingkungan dan sumber keuangan, keluarga yang berada di tahapan prasejahtera / sejahtera tahap I ternyata kurang memiliki kekuatan tersebut. Peran pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dengan menetapkan berbagai kebijakan pembangunan yang bernuansa pemberdayaan, pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha masyarakat desa. Berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang ternyata banyak menciptakan masalah bagi masyarakat pedesaan mengingat program-program tersebut kurang mengikutsertakan masyarakat lokal.

Walaupun demikian ternyata sebagian besar masyarakat masih tetap mengharapkan peranan pemerintah utamanya dalam kebijakan-kebijakan makro yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat pedesaan. Hasil-hasil penelitian tersebut, dapat memberikan kontribusi sebagai komparatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian Maximianus Agus Prayudi menemukan adanya faktor modal usaha, tenaga kerja, pengalaman, curahan jam kerja dan jiwa kewirausahaan secara bersama berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pengrajin industri kecil. I Wayan Wisarda menemukan faktor lingkungan industri dan kemitraan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha industri. Unggul menemukan pentingnya keberpihakan dan kepedulian administrasi publik serta koordinasi yang baik dalam pengembangan industri tempe. Eny Rachyuningsih menemukan pentingnya penerapan kebijakan pembangunan yang bernuansa pemberdayaan, pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha masyarakat desa.

Dari berbagai substansi hasil penelitian tersebut, yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah, kelompok usaha dan swasta dalam memberdayakan industri kecil, pola kemitraan yang terjadi dan hubungan berbagai aktor (pemerintah, kelompok usaha dan swasta) yang terlibat dalam proses pemberdayaan industri kecil.

C Kerangka Berpikir

Pengembangan ekonomi lokal selain meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas produktif masyarakat melalui industri kecil dan menengah yang sering dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini diupayakan bahwa masyarakat diberi hak untuk turut serta didalam

pembangunan untuk meningkatkan pola konsumtif sekaligus pola produktif. Pola produktif lokal ini secara praktek tidak terkena oleh imbas terpuruknya ekonomi global melalui berbagai investasi antar negara. Hal ini terjadi karena jumlah produksi terserap oleh konsumsi masyarakat secara lokal. Untuk itu pentingnya peningkatan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan kelembagaan masyarakat yang bersifat produktif dengan memberikan berbagai fasilitas yang menunjang keberadaan tersebut.

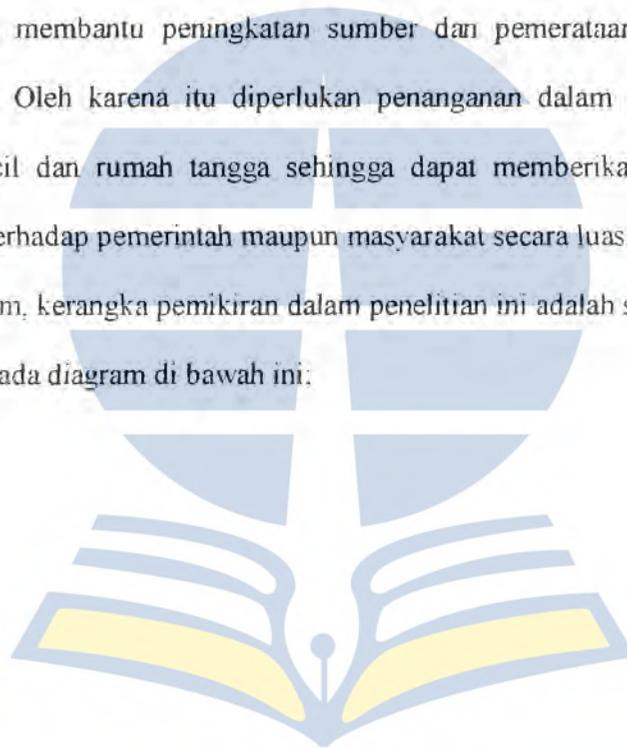
Pada masa krisis moneter, industri kecil dan menengah merupakan usaha yang tidak terkena imbas krisis karena serapan konsumsi adalah pada tingkat lokal dan sebagian besar bahan baku menggunakan bahan lokal. Selain itu, karakteristik usaha Industri Kecil dan Menengah ini adalah industri padat karya dimana banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan modal. Sehingga secara ekonomi terjadi pemerataan pekerjaan dan pendapatan. Badan Pusat Statistik (2003) menyebutkan bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 % dari total jumlah unit usaha. UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja. Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 %. Kemudian sumbangan UKM terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 % dari total nilai ekspor.

Dalam pengembangan ekonomi lokal terdapat berbagai kendala antara lain : permodalan, ketrampilan dan pemasaran. Banyak dari usaha kecil dan menengah tidak dapat bersaing akibat persoalan diatas. Permodalan yang rendah mempengaruhi peningkatan jumlah produksi yang akan terkait dengan jumlah tenaga kerja dan pendapatannya. Ketrampilan merupakan bagian dari kinerja

produksi yang mampu mempunyai daya saing pasar yang tinggi sehingga mampu untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal ini yang masih perlu dikembangkan didalam masyarakat. Saat ini sering terjadi stagnasi ketrampilan produksi yang berakibat kualitas produksi yang tidak meningkat. Permasalahan lain adalah dari sisi pemasaran yang lemah sehingga produk tidak dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

Sampai saat ini meskipun masih banyak kendala dalam pengembangan industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT). Usaha ini mempunyai prospek yang baik dalam membantu peningkatan sumber dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penanganan dalam pengelolaan usaha industri kecil dan rumah tangga sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerintah maupun masyarakat secara luas.

Secara umum, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimana tercantum pada diagram di bawah ini:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Operasionalisasi Konsep

Kondisi strategis Indonesia sebagai negara agraris merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Bentuk pengembangan sektor pertanian salah satunya dengan cara memajukan sektor agribisnis dan agroindustri yang merupakan suatu sistem keterpaduan sektor pertanian baik input, proses maupun output dengan industri yang mampu memberikan dampak pada pengembangan ekonomi, sosial, politik, budaya bangsa Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, pemerataan pendapatan yang akhirnya mampu membawa peluang pengembangan sektor pertanian menjadi lebih besar.

Agribisnis sama dengan perusahaan manufaktur, elektronika, real estate, finance, asuransi, jasa atau bidang lain yang memerlukan sentuhan manajemen pemasaran yang terencana, terorganisir dan terkoordinasi dengan baik. Agribisnis merupakan produk yang *marketable* dan vital karena menyangkut bahan kebutuhan pangan masyarakat dunia, sehingga peluang bagi produk agribisnis dapat bersaing di pasar domestik bahkan luar negeri terbuka luas. Namun, kondisi di Indonesia sangat sedikit perusahaan besar agribisnis milik bangsa sendiri yang berkembang, yang terjadi adalah banyaknya usaha agribisnis yang masih berskala rumah tangga, kecil dan sedang, saat ini fenomenanya muncul pemain luar negeri yang berinvestasi pada lahan usaha ini. Dengan kondisi seperti di atas, penting sekali semua perusahaan agribisnis dari skala rumah tangga hingga perseroan harus mempelajari dan memahami manajemen pemasaran, agar di tengah persaingan tetap eksis.

Agribisnis mencakup tiga sektor yang saling terkait secara ekonomis, yaitu sektor masukan (input), produksi dan output (keluaran). Sektor masukan terdapat pengusaha/produsen-produsen yang memproduksi input bagi proses produksi hasil pertanian, seperti penyedia benih/bibit, pupuk, obat-obatan, makanan ternak, mesin pertanian, kredit pertanian dan lembaga pendukung lainnya.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi kedelai tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 18,61 persen. Dari 0,83 juta ton biji kering pada 2001 menjadi 0,67 juta ton biji kering di tahun 2002. Atau mengalami penurunan sebesar 0,15 juta ton biji kering. Penurunan ini karena turunnya luas panen kedelai sekitar 19,79 persen atau 0,13 juta hektare. Di sisi lain kebutuhan pangan cenderung meningkat 2,5-4% sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Kebutuhan kedelai pada tahun 2003 masing-masing berjumlah 1,95 juta ton, 3 juta ton, dan 3,5 juta ton. Melihat data produksi akan kebutuhan kedelai pada tahun 2003 terlihat bahwa terjadi defisit untuk komoditas kedelai 1,3 juta ton. Defisit kedelai ini diatasi dengan cara mengimpor. Harga kedelai saat ini mencapai kisaran Rp3500/kg. Dengan jumlah penduduk yang besar sekitar 216 juta jiwa pada tahun 2003 dan laju pertumbuhan 1,35% per tahun, maka kebutuhan kedelai akan semakin besar di masa mendatang. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 220,6 juta jiwa, dan tahun 2010 sebesar 236 juta.

- 1) Industri, Bidang Usaha, Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- 2) Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- 3) Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
- 4) Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
- 5) Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
- 6) Kelompok Industri Kecil adalah meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Kecil, termasuk Industri Kerajinan dan Industri Rumah Tangga.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (1994: 45) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya". Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong (1994: 56):

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (1998: 34) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

E. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Pentingnya penetapan fokus penelitian diungkapkan oleh Lexy Moleong (1994) sebagai berikut:

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas penelitian atas dasar fokus yang ditetapkan sebagai masalah dalam penelitian. Ini disebabkan oleh beberapa hal:

- (1) batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus.
- (2) penetapan fokus dapat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha memberi batas penelitian. Fokus pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam memberdayakan pengusaha industri kecil tempe di Kelurahan Madurejo kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. hal ini dilihat dari:
 - a. Pembinaan permodalan
 - b. Pengembangan SDM
 - c. Pengembangan teknologi dan peralatan
 - d. Penyediaan bahan baku
 - e. Pengembangan pemasaran
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan Industri Keripik Tempe Agar Dapat Meningkatkan Daya Saing pengusaha industri tempe Madurejo kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. hal ini dilihat dari:
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Narasumber

Dalam suatu aktifitas penelitian, yang dicari seorang peneliti pada prinsipnya adalah data. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dengan senantiasa berupaya menjangkau kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan (realitas). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pada penelitian ini sumber-sumber data yang dipergunakan antara lain:

a. Data Primer

Data utama yang dijadikan landasan penulis dalam penelitian, yang diperoleh dengan jalan wawancara dengan informan dan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi).

b. Data Sekunder

Data yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berupa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Mikro dan lain-lain.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. Menurut Arikunto (2002:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pengumpul data. Dengan kata lain peneliti adalah sebagai alat dalam mencari sumber data. Ini dilakukan karena memanfaatkan tenaga manusia sangat mudah, karena tanpa memerlukan persiapan yang panjang. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain: *pertama*, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*taeii*) di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah *pertama*, sungguh tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis".

Ketiga, peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya, diterima atau ditolak. Tetapi peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancar waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal (waktu) dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹ Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*purposive sampling*), dengan cara bola salju (*snow ball*) yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengusaha kecil dan mikro di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang mewakili
- b. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Pasar atau yang mewakili
- c. Kepala Dinas BPMDes atau yang mewakili
- d. Camat Arut Selatan
- e. Kepala Seksi PMD Kecamatan Arut Selatan
- f. Kepala Kelurahan Madurejo
- g. Kasi Pembangunan dan Kesra Kelurahan Madurejo
- h. Dan informan lain yang dirasakan perlu

Selain informan pendukung penulis juga menggunakan sumber data yang berupa *place* atau *paper* untuk mendukung data yang bersumber dari *person* atau responden. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan *memberchek* atau pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012) cet: XVII hal. 90.

sehingga data lebih valid dan lebih objektif. Lebih mudah membicarakan teknik wawancara dibanding dengan melaksanakannya. Kondisi lapangan yang sangat bervariasi, menyebabkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh pewawancara menjadi kurang atau bahkan tidak terjadi. Pewawancara tidak sekedar harus mengerti apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga harus kreatif menangani persoalan yang muncul di lapangan.

Tidak jarang responden memberikan respons yang tidak sesuai dengan harapan pewawancara. Tugas pewawancara tidak hanya bertanya, tetapi juga mendengarkan dengan seksama, merekam apa yang didengarnya, dan melakukan pertanyaan ulang dan mendalam jika diperlukan. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilakukannya dengan baik, maka pewawancara harus melatih diri dan mempersiapkan proses wawancara sebaik mungkin. Di bawah ini disajikan tahapan-tahapan yang secara umum dilakukan oleh sebagian besar pewawancara pada saat mereka berupaya mencari informasi dari responden penelitiannya.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan atau memperoleh data, menggunakan beberapa prosedur yaitu :

i. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Teknik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek yang diteliti. Notoatmojo (2002) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian adalah suatu hal perbuatan jiwa secara aktif dan

penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan penginderaan yang dilanjutkan dengan adanya pengamatan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang

- a. Gambaran umum tentang keadaan umum wilayah.
- b. Gambaran tentang pengimplementasian kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri kecil khususnya produsen tempe.

2. Interview/Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Disamping itu juga Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap, bersua muka dengan responden (*face to face*) wawancara adalah percakapan duabelah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin, sebab sekalipun wawancara dilakukan secara bebas tetapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, majalah, dokumen, surat-surat, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Selain itu Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dokumenter, seperti kondisi sekolah, serta fasilitas-fasilitas yang

dimiliki, jumlah siswa, jumlah guru, kalender pendidikan dan hal-hal penting lainnya yang mendukung terhadap kelengkapan data.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi dan Gambaran Umum Wilayah Lokasi Penelitian.
- b. Upaya pemberdayaan industri kecil dan mikro khususnya industri tempe di Kelurahan Madurejo.
- c. Sarana dan Fasilitas Industri Kecil dan Mikro.

F. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian diskriptif, maka setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh diakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Tehnik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (dalam Miles dan Hubberman 1992:15). Dalam model analisa ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, dengan komponen-komponen analisa data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (interview

guide). Dalam hal ini saya selaku peneliti akan melakukan wawancara pada implementor yang berdasarkan pedoman wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan sekaligus saat melakukan wawancara.

b. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, menulis memo. Selanjutnya, dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap seperti ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pacu, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan makan tenaga yang relative lebih banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.

Model interaktif komponen-komponen analisa data tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20)

Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak diantara empat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah Kecamatan Arut Selatan

1. Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Arut Selatan dengan ibu kota Pengkalan Bun sekaligus merupakan Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Barat, terletak pada $2^{\circ}41'84''$ LS - $111^{\circ}37'08''$ BT. Garis pantai sepanjang 20 km, dilintasi oleh 2 (dua) sungai besar yaitu DAS Arut (panjang 250 km) dan DAS Lamandau (panjang 300 km). 145 anak sungai dan 5 buah danau serta rawa-rawa. Khusus perairan umum secara keseluruhan dengan luas 690 km^2 atau 28 % dari luas wilayah kecamatan, ketinggian antara 2 – 500 m dpl, suhu berkisar antara $22,0 - 33,6 \text{ C}^{\circ}$ dan curah hujan antara 41 – 487 mm. Topografi tanah bergelombang sampai berbukit semakin ke Utara. kearah Selatan terdiri dari rawa-rawa yang mempunyai struktur tanah longgar atau tanah gambut dengan kadar asam cukup tinggi.

Secara geografis Kecamatan Arut Selatan mempunyai batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lada

Kecamatan Arut Selatan adalah salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai luas wilayah 2.400 km^2 atau 22,31% dari luas Kabupaten Kotawaringin Barat 10.579 km^2 , mencakup 7 Kelurahan dan 13 Desa. Sebagaimana kebiasaan Desa dan kelurahan di pulau Kalimantan berada

tersebar di pinggir sungai Arut sebanyak 11 desa/kelurahan dan dipinggir sungai Lamandau sebanyak 3 desa, didiami sebanyak 101.805 orang penduduk. lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1, berikut :

Tabel 1.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Arut Selatan berdasarkan desa/kelurahan sampai Tahun 2011

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (orang)		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Ds. Tanjung Putri	1.712	1.059	1.062
2.	Ds. Kumpai Batu Atas	1.897	1.878	1.890
3.	Ds. Kumpai Batu Bawah	2.891	2.828	2.840
4.	Ds. Pasir Panjang	5.901	8.568	8.776
5.	Kel. Mendawai	16.503	12.132	12.154
6.	Kel. Mendawai Seberang	2.464	2.067	2.078
7.	Kel. Raja	7.515	6.589	6.598
8.	Kel. Sidorejo	12.323	15.494	15.709
9.	Kel. Madurejo	11.980	15.664	16.056
10.	Kel. Baru	17.818	20.429	20.693
11.	Kel. Raja Seberang	1.902	1.769	1.779
12.	Ds. Rangda	807	950	991
13.	Ds. Kenambui	475	607	618
14.	Ds. Runtu	1.139	3.546	3.662
15.	Ds. Umpang	587	864	902
16.	Ds. Natai Raya	2.477	1.425	1.443
17.	Ds. Medang Sari	883	1.225	1.243
18.	Ds. Natai Baru	1.069	1.641	1.663
19.	Ds. Tjg Terantang	959	742	749
20.	Ds. Sifulung	475	884	899
Jumlah		92.963	100.361	101.805

Sumber : BPS Kotawaringin Barat, 2012.

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan sampai Tahun 2011, sebanyak 101.805 orang atau 41,42 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 245.762 orang. Ini menggambarkan jumlah penduduk terkonsentrasi di kecamatan ini, disamping sebagai kedudukan ibu kota Kabupaten juga sebagai salah satu pusat

perekonomian daerah, bahkan kabupaten pemekaran seperti Kabupaten Sukamara dan Lamandau.

Melihat dari letaknya yang berada di tengah-tengah kecamatan lain. Kecamatan Arut Selatan merupakan sentral perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian, sektor ini merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar. Kontribusinya pada sektor pertanian Tahun 2011 sebesar 42,57 %, termasuk perikanan. Sebagai penyumbang PDRB daerah, perikanan dan kelautan juga merupakan salah satu andalan Pemerintah Daerah dalam memacu pembangunan yang menganut konsep ekonomi kerakyatan baik pada tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Sektor Perikanan dan Kelautan memegang peranan yang strategis dalam memberikan kontribusi PDRB terbesar kedua setelah tanaman pangan pada kelompok pertanian. Tercatat pada tahun 2011, yaitu sebesar 2,16 %, menurun dari tahun 2010 sebesar 2,47 %, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2.
PDRB Sektor Pertanian Kab. Kotawaringin Barat menurut Daftar harga berlaku
Tahun 2007-2011 (Jutaan Rp)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Tanaman Pangan	61.884,39	61.330,14	62.183,11	69.418,35	76.242,25
Tanaman Perkebunan	1.321,790	1.393,265	1.482,083	1.603,231	1.819,228
Peternekan	57.113,50	63.057,01	71.393,43	81.317,72	90.072,64
Kehutanan	97.554,63	107.067,07	93.819,07	93.108,01	86.946,37
Perikanan	78.826,29	85.290,04	94.671,95	101.014,41	110.749,99

Sumber : BPS Kotawaringin Barat, 2012.

2. Gambaran Kondisi dan Potensi Industri Kecil Tahu Tempe

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, pengusaha Tahu Tempe yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup banyak yaitu sekitar 562 pengusaha, dengan jumlah tenaga kerja 2810. Para pengusaha Tempe tersebut tersebar di desa-desa yang ada di Kecamatan dalam Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 15 unit usaha usaha pembuatan tempe yang berada dalam wilayah Kelurahan Madurejo. Dari keseluruhan pengusaha pembuatan tempe tersebut belum semuanya memiliki ijin usaha. Yang sudah memiliki ijin usaha berkisar 9 – 15%, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.
Daftar Nama Pengusaha

No	Pengusaha	Unit Usaha
1.	Sumardjo	UD. Sumar Prima
2.	Ny. Haryati	UD. Sederhana
3.	Paidjan	UD. Sumber
4.	Parjo / Kholil	UD. Arum
5.	Sumadji	UD. Sarinah
6.	Jarodi	UD. Kelapa Gading
7.	Tartono	UD. Jati Wangi
8.	Sodi	UD. EL Farisi
9.	Leso	UD. Murni
10.	Hartono	UD. Sumber Harapan
11.	Jito	UD. Karunia
12.	Warsito	UD. Wahyu Agung
13.	Martius Nugroho	UD. Cantika
14.	Narno	UD. Karya
15.	Wito	UD. Lestari

Sumber : Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa para pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo yang sudah berijin berjumlah 15 pengusaha atau sekitar 10,9 % dari 156 pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pengusaha usaha pembuatan tempe untuk mengurus perijinan masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan, bahwa para pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo lebih memilih membuka usahanya secara diam-diam tanpa harus melalui birokrasi pemerintah untuk perijinannya, karena tingkat pendidikan dan pengetahuan yang kurang. Ada anggapan sebagian mereka bahwa dengan pengurusan perijinan akan menambah pengeluaran yang cukup banyak. Industri Tempe yang ada di Kelurahan Madurejo berjumlah 156 buah, yang terdiri dari industri besar, industri sedang dan industri kecil, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 10.
Industri Tahu Tempe di Kelurahan Madurejo

No	Industri	Jumlah (buah)
1.	Besar (pekerja 11- keatas)	33
2.	Sedang (pekerja 6 – 10)	40
3.	Kecil (pekerja 1-5)	83
	Jumlah	156

Sumber : Dinas Koperasi, Pasar Dan Umkm Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan table tersebut nampak bahwa industri kecil Tempe Madurejo mempunyai jumlah yang lebih banyak disbanding yang lain yaitu 83 buah atau sekitar 53% dari jumlah keseluruhan usaha pembuatan tempe Madurejo. Sebagian besarmasalah utama yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah kurangnya modal, lemah dalam organisasi dan manajemen SDM serta keterbatasan informasi pasar. Mengingat kondisi yang demikian tepat apabila keberadaan para pengusaha kecil usaha pembuatan tempe perlu diberdayakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, industry kecil Tempe yang ada di Kelurahan Madurejo sebanyak 156 unit, belum terbentuk kelompok usaha bersama dan cenderung untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Namun dalam kenyataan di lapangan telah terjalin hubungan pribadi yang bersifat informal tanpa diwadahi oleh kelompok usaha bersama.

Memang pernah ada pada tahun 1980 kelompok usaha bersama pengusaha industri usaha pembuatan tempe Madurejo dengan 5 orang anggota yang diketuai oleh Suwito. Namun kelompok usaha bersama tersebut hanya mampu bertahan selama ±1 setengah tahun, seperti ditegaskan oleh salah satu anggota tersebut.

Paidjan (55 tahun), pengusaha usaha pembuatan tempe Sumber sebagai berikut :

"Tahun 1980 pernah didirikan kelompok usaha bersama yang didukung 5 orang dengan ketua Bapak Suwito. Masing - masing anggota mengumpulkan uang yang selanjutnya dibelikan kedelai ke pasar. Setiap membeli kedelai dapat membawa 2 kwintal. Selanjutnya kedelai tersebut dijual kepada orang yang membutuhkan. Namun tidak dapat menghasilkan keuntungan. Kurang lebih berjalan 1 setengah tahun uang tersebut dikembalikan". (Wawancara tanggal 6 April 2014).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa para pengusaha usaha pembuatan tempe dapat saling bekerjasama, saling membantu dan membentuk kelompok usaha. Hal tersebut harus mendapat pembinaan secara berkesinambungan dari dinas terkait tentang pentingnya kelompok usaha bersama, sebab apabila mereka dibiarkan akan cenderung untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri.

Tenaga kerja yang dipekerjakan pada industry kecil tersebut berkisar antara 1 sampai 5 orang yang terdiri dari tenaga kerja yang tidak dibayar dan tenaga kerja yang dibayar. Tenaga kerja tidak dibayar terdiri dari pemilik atau pengusaha itu sendiri, istri serta anak-anak mereka. Istri mereka membantu setelah pekerjaan rutin rumah tangga selesai berkisar antara Pukul 09.00 - 16 00 WIB.

sedangkan anak-anak mereka membantu sepulang darisekolah dan pada hari libur.

Tenaga kerja dibayar adalah tenaga kerja yang menerima upah dengan sistem pembayaran harian, mingguan atau borongan. Tenaga kerja ini bersifat musiman tanpa ada ikatan kontrak kerja dan dapat direkrut apabila banyak pesanan pembuatan usaha tempe. Pembayaran berkisar antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- perhari, atauRp. 350.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- perminggu. Pekerjaan dimulai pukul 07.00 - 16.00 WIB selama 7 hari, dengan jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB untuk makan siang dan sholat.

Latar belakang pendidikan pengusaha industri kecil Tempe Kelurahan Madurejo adalah sebagian besar SLTP dan SLTA. Sedangkan tenaga kerjanya mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh pengusaha industri kecil Tempe Kelurahan Madurejo cukup lama berkisar antara 5- 30 tahun, yang sebelumnya sebagian besar bekerja sebagai pekerja pada perusahaan-perusahaan usaha pembuatan tempe. Berkat pengalaman yang cukup panjang, kemampuan serta ketrampilan mengelola usaha, industry tersebut bisa lebih mandiri dan berkembang, dan pada akhirnya dari hasil yang disisihkan dan dengan modal yang cukup, sebagian pekerja mendirikan sendiri perusahaan usaha pembuatan tempe.

B. HASIL PENELITIAN

1. Upaya pemerintah dalam memberdayakan pengusaha industri kecil tempe di Kelurahan Madurejo kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Upaya Dinas Koperasi, Pasar Dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemberdayaan industri keripik tempe agar dapat meningkatkan daya saing antara lain melalui pembinaan permodalan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi dan peralatan, dan pengembangan pemasaran.

1) Pembinaan Permodalan

Peningkatan mutu industri kecil membutuhkan modal yang cukup besar, karena untuk memproduksi barang yang berkualitas minimal dibutuhkan adanya tenaga yang ahli di bidangnya, bahan baku yang bermutu, serta peralatan yang memadai untuk memproduksi. Penyediaan faktor-faktor tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam memberdayakan industri kecil yang masih lemah pada segi keuangan tersebut Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat membantu para pengrajin melalui pembinaan permodalan. Pada saat ini, pembinaan permodalan yang dilakukan oleh Dinas adalah dengan bertindak sebagai fasilitator antara pihak perbankan atau non perbankan yang akan memberikan bantuan keuangan dengan para pengusaha kecil, melalui penyuluhan berkaitan dengan kredit atau bantuan modal lunak yang diberikan oleh pihak perbankan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Staff Bagian Industri Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat, Bapak Setyo Budi bahwa:

"Masalah permodalan adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha industri kecil. Pada saat ini pemberian bantuan berupa dana bagi

para pengusaha kecil bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM, kami membantu meningkatkan kemampuan permodalan para pengusaha kecil dengan memberikan informasi serta pelatihan dalam membuat proposal pengajuan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan. Dalam hal ini kami mencoba memberikan petunjuk atau pengarahan tentang bagaimana pengajuan proposal yang baik untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan tersebut. Jadi kami disini hanya sebagai perantara antara para pengusaha industri kecil dengan bank sebagai pemberi bantuan modal". (Wawancara hari Senin, 14 April 2014)

Pendapat Bapak Setyo Budi tersebut dibenarkan oleh Ibu Sri Handayani, pemilik dalam wawancara berikut:

"Saya dan para pemilik industri tempe mendapatkan pembinaan dalam memperoleh kredit lunak untuk membantu menambah modal" (Wawancara hari Rabu, 20 April 2014)

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Syamsul Arifin, pemilik Industri Tempe, dalam wawancara berikut:

"Saya dan beberapa pemilik dulu pernah mendapatkan bantuan permodalan, tetapi pada saat ini sudah tidak pernah lagi, yang diberikan pada saat ini adalah penyuluhan tentang bagaimana memperoleh kredit lunak dari bank." (Wawancara hari Rabu, 20 April 2014)

Permodalan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan para pengusaha industri baik kecil, sedang maupun besar. Modal dapat menjadi dilemma tersendiri bagi pengusaha yang hanya mempunyai modal sedikit atau bahkan tidak mempunyai modal sama sekali. Dengan modal yang cukup atau berlebih diharapkan akan diperoleh keuntungan guna pengembangan usaha.

Modal usaha merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi pengusaha industri. Sebelum terjadinya masa krisis ekonomi, untuk memulai usaha industri Tempe diperlukan modal usaha antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Modal usaha

tersebut diperlukan untuk pembelian bahan baku dan pembelian peralatan. Apabila dikomposisikan maka dapat diklasifikasikan modal tersebut sebagai berikut :

- a. Untuk para pengusaha industri kecil usaha pembuatan tempe memerlukan modal usaha antara Rp. 1.200.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dan modal tambahan Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-.
- b. Usaha para pengusaha industri sedang usaha pembuatan tempe memerlukan modal usaha antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan modal tambahan > Rp. 10.000.000,-.
- c. Untuk para pengusaha industri besar usaha pembuatan tempe memerlukan modal usaha antara Rp. > 50.000.000,- dan modal tambahan antara Rp. > 50.000.000,-.

Hal ini seperti disampaikan oleh Suwadji, umur 29 tahun lulusan SLTP, pekerjaan pengrajin usaha pembuatan tempe "Ayu" sebagai berikut:

"Dulu saya kerja sebagai tukang kayu. Saya punya keinginan dan ketrampilan, ingin mandiri dan ingin kerja di rumah. Dengan modal awal sedikit demi sedikit saya beli bahan yang diedarkan untuk dijadikan tempe. Akhirnya terkumpul ± Rp.200.000 untuk usaha. Usaha pembuatan tempe saya mulai usaha pada tahun 1997. Kalau sekarang sudah memiliki mesin gilingan. Pengaruh krisis moneter untuk perusaha pembuatan tempe tidak ada. Cuma untuk bahan dan keperluan usaha pembuatan tempe (alat) agak meningkat karena mengikuti arus dolar, harga penjualan tetap. (Wawancara tanggal 5 April 2014).

Lebih lanjut Suwadji menjelaskan bahwa untuk memperoleh tambahan modal dia tidak terlalu memikirkan terhadap bunga pinjaman tersebut asalkan dapat memperolehnya dengan waktu yang relative cepat. Bahkan untuk memperoleh tambahan modal tersebut ditempuh melalui bank harian. Sedangkan pengusaha lain mengemukakan bahwa untuk memperoleh modal, telah dilakukan

berbagai cara diantaranya, sebagaimana disampaikan oleh Paidjan, umur 55 tahun, pengusaha pembuatan tempe UD. Sumber Madurejo sebagai berikut :

"Untuk modal awal, pada saat itu tahun 1990 saya pinjam lima puluh juta rupiah lewat KUD. Saya sudah mengurus kesana kemari, namun tidak bisa lolos. Akhirnya saya langsung mengajukan sendiri ke BPD, lima hari setelah pengajuan tersebut ternyata bisa dikabulkan, saya belikan mesin, bahan dan ijin HO. Tapi pengambilannya saya lakukan secara bertahap sesuai kebutuhan). (Wawancara tanggal 7 April 2014).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara dapat dikemukakan bahwa kendala yang dihadapi oleh para pengusaha industri kecil Tempe dalam hal permodalan adalah karena keterbatasan kemampuan keuangan dan ketidakberdayaan mereka untuk memperoleh akses modal dari lembaga keuangan dan pihak luar, misalnya banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam meminjam Bank serta tidak adanya jaminan yang diminta oleh pihak Bank.

Para pengusaha usaha pembuatan tempe mula pertama memiliki modal awal yang dimilikinya baik yang berasal dari hasil tabungan maupun dari usaha lain ditambah dengan pinjaman dari keluarga dan saudara, sedangkan untuk modal selanjutnya para pengusaha menyisihkan dari keuntungan usahanya.

Mengingat modal merupakan salah satu factor yang ikut menentukan keberhasilan para pengusaha Tempe, para pengusaha usaha pembuatan tempe berharap bias memiliki modal yang lebih besar dan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah guna pengembangan usaha. Dengan tambahan bantuan modal sebesar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000,- para pengusaha akan dapat melakukan perbaikan alat produksi dan membuka *warung tempe* sendiri, seperti dituturkan oleh Suwadji, umur 29 tahun, Pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo sebagai berikut:

“Kesulitan para pengrajin usaha pembuatan tempe saat ini adalah mengenai masalah modal untuk memperlancar dan memperbesar usaha mengenai masalah tenaga kerja mudah dicari. Permohonan saya hendaknya pemerintah dapat memberikan bantuan berupa apa saja termasuk memberikan bantuan kredit untuk usaha kecil”. (Wawancara tanggal 6 April 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik took UD. Cantika, Martius Nugroho sebagai berikut :

“Saya mendapatkan pinjaman dari BRI untuk modal usaha dengan mudah karena syarat-syarat yang dibutuhkan oleh BRI telah saya penuhi”. (Wawancara tanggal 6 April 2014).

Untuk mendapatkan bantuan modal dari Lembaga Perbankan ternyata bagi pengusaha industri Tempe yang sudah mapan dan telah memiliki legalitas usaha tidak mengalami kesulitan yang berarti seperti disampaikan oleh Narno, pengusaha usaha pembuatan tempe UD Karya sebagai berikut:

“Apabila saya sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh BRI, maka pinjaman yang saya perlukan akan segera dicairkan sesuai kondisi setelah diadakan survey oleh BRI”. (Wawancara tanggal 7 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dikemukakan bahwa para pengusaha usaha pembuatan tempe sangat mengharapkan adanya tambahan modal baik melalui kredit perbankan ataupun bantuan pemerintah yang digunakan untuk pengembangan usaha. Mengingat kondisi pengusaha usaha pembuatan tempe bervariasi maka untuk mendapat pinjaman dari bank, ada yang mudah ada yang sulit bahkan ada yang tidak bisa pinjam BRI karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta BRI.

Tetapi juga dalam faktanya masih ada kesulitan permodalan yang ditunjukkan bahwa sulitnya para pengusaha mencari tambahan modal melalui pinjaman ataupun kredit pada Bank karena tidak adanya legalitas usaha, tidak adanya agunan maupun tidak adanya lembaga penjamin.

Namun kondisi yang kurang menguntungkan tersebut tidak dialami oleh semua pengusaha industry kecil Tempe Madurejo. Sebagai contoh Tartono, Kholil, Sariman dan Loso, kurang lebih tahun 2000 telah mendapat bantuan kredit dari BRI sebagaimana dinyatakan oleh Tartono pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo sebagai berikut :

"Saya bersama ternan- ternan mendapat bantuan kredit dari BRI, kalau dulu mendapat pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- sekarang mendapat pinjaman Rp.5.000.000,-untuk pengembangan usaha usaha pembuatan tempe".(Wawancara tanggal 12 April 2014).

Mengingat kondisi yang kurang baik tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyadari bahwa dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu juga mengambil bagian/peranannya.apabila ingin membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Khusus mengenai modal, Pemerintah KabupatenKotawaringin Barat melalui Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat proyek jangka menengah pembinaan pengusaha kecil dengan penyediaan alokasi dana pada APBD KabupatenKotawaringin Barat.

Untuk tahun 2013 pada belanja pembangunan sector industry dialokasikan dana sebesar Rp. 352.980.000,- namun tidak semua dana tersebut bias direalisasikan. Dana tersebut direalisasikan sebesar Rp. 7.530.000,- (2,1%) karena dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013, sebagian alokasi dana yang sedianya dialokasikan untuk pos belanja pembangunan dialihkan untuk pos belanja pegawai. Sedangkan pada tahun 2012 saat ini untuk belanja pembangunan sector industri sebesar Rp.352.600.000,-

Pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo sebagian bekerja sendiri-sendiri tanpa membentuk kelompok usaha. Padahal syarat untuk mendapatkan bantuan dari Departemen Koperasi saat itu adalah dalam bentuk usaha kelompok mengingat misi pembinaan bersifat kelompok agar bisa berkembang. Memang pada tahun 1998 telah dibentuk kelompok usaha bersama yang berbadan hukum dengan nama KOPINKRA Madurejo dengan pimpinan Tartono. Namun dalam perjalanannya koperasi tersebut tidak pernah mengadakan RAT administrasi tidak lengkap, dan manajemen kurang baik, sehingga Kopinkra Madurejo tidak pernah mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah. Hal tersebut ditegaskan oleh Tartono pengusaha usaha pembuatan tempe Madurejo sebagai berikut:

“Kopinkra Madurejo yang didirikan tahun 1998 tidak pernah mendapat bantuan modal dari pemerintah karena syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh Kopinkra.” (Wawancara tanggal 8 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa belum terbentuknya secara penuh kelompok usaha bersama pada industri kecil Tempe Madurejo merupakan suatu kendala dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pembinaan permodalan tersebut diharapkan mampu untuk mendorong para pengusaha dan pemilik industri tempe baik dari segi kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, peralatan yang dimiliki, serta penunjang pemasaran, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing industri kecil.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

a) Pendidikan dan Pelatihan

Produk tempe yang berkualitas sangat terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, baik pengusaha maupun pekerja sehingga dapat menguasai teknik produksi, mengelola usaha, serta memasarkan produk. Untuk meningkatkan teknik produksi serta kemampuan manajerial pada industri tempe, maka Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan industri kecil melakukan berbagai pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pengembangan kemampuan pengusaha kecil dan pekerja di Sentra industri tempe dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Jenis pelatihan yang diberikan bermacam-macam, antara lain pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen.

Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Setyo Budi, Staff Dinas Koperasi, Pasar Dan Umkm Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Tugas ini dalam upaya pemberdayaan industri kecil, adalah dengan memberikan pembinaan dan pelatihan, dengan tujuan agar pengusaha industri kecil *mendapatkan tambahan ilmu untuk dapat mengembangkan usahanya. Diklat yang telah diberikan kepada para pengusaha kecil bermacam-macam, mulai dari desain produk, standarisasi produk, serta manajemen*” (Wawancara, 14 April 2014)

Lebih lanjut lagi Bapak Setyo Budi menjelaskan bahwa:

“Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para pengusaha dan pekerja juga disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan serta kebutuhan para pengusaha. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM juga bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk memberikan pelatihan. Misalnya, dengan Fakultas Ekonomi dalam pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan manajemen” (Wawancara hari Senin, 14 April 2014)

Pendapat Bapak Setyo Budi tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak SyamsulArifin selaku Ketua Paguyuban Pengusaha Tempe dalam Wawancara berikut:

“Para pengusaha kecil disini mendapatkan banyak masukan dari Diklat-diklat yang diadakan oleh Dinas, materinya bermacam-macam, antara lain tentang standarisasi mutu, dan pelatihan manajemen usaha” (Wawancara hari Rabu, 20 April 2014)

Pendapat Bapak Syamsul Arifin tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Anisa pemilik industri tahu dalam wawancara berikut:

“Ya, pelatihan yang saya dapatkan macam-macam, kadang tentang desain produk, diklat manajemen juga pernah. Semuanya bermanfaat buat saya” (Wawancara hari Rabu, 2 Maret 201)

Dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh dua lembaga sekaligus, maka diharapkan dapat meningkatkan usaha, serta mampu pula untuk meningkatkan daya saingnya, dengan memperbaiki mutu dan kualitas, desain, serta manajemen agar dapat menarik minat konsumen.

b) Studi Banding

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia juga dilakukan dengan studi banding yang bertujuan untuk mengetahui kondisi serta perkembangan industri di luar Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian membandingkan dengan kondisi yang terjadi pada industri tempe. Tujuan Studi Banding adalah daerah atau kota dengan industri tempe yang dirasa sama atau lebih dahulu berkembang daripada Industri tempe. Pada tahun 2004 Studi Banding juga dilaksanakan hingga Negara Taiwan. Studi Banding ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat bekerjasama dengan Propinsi, dengan mengirimkan dua orang pengusaha.

seperti bagaimana diutarakan oleh Bapak Gunari, Staff Bidang Kopernasi dan

UM dalam wawancara berikut:

"Salah satu upaya pengembangan sumberdaya manusia bagi para pengusaha industri kecil dilakukan dengan studi banding, dimana dengan studi banding para pengusaha industri kecil dapat melihat langsung keadaan dan perkembangan industri kecil di daerah lain. Studi Banding sudah dilaksanakan beberapa kali, bahkan pernah sampai ke negara Taiwan tahun 2004" (Wawancara narasumber Januari 2014)

Program studi banding membawa manfaat positif bagi para pengusaha kecil. Dengan studi Banding, para pengusaha dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan usaha sejenis dan berbagai pengetahuan tentang pengusaha kecil lain di luar daerah tentang kiat-kiat yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan usahanya, kemudian menjadi motivasi bagi para pengusaha untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasaran.

Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Siono, Pemilik Usaha Keripik Keripik. Dengan studi banding ke luar kota, membuat saya dan juga para usahawan lain mendapat banyak pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Dan saya setelah mengikuti studi banding akan mencoba menerapkan pengetahuan yang didapat dan beraniminovasi agar produk-produk kami lebih beradab dan usahanya lebih berkembang" (Wawancara narasumber April 2014)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Syamsul Arifin pemilik Usaha Keripik Tempe dalam wawancara berikut:

"Saya sudah mengikuti studi banding yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Baru beberapa kali, bahkan juga mengikuti banding sampai ke Taiwan. Saya senang mengikuti studi banding karena manfaatnya sangat besar, pengetahuan tentang industri tempe yang saya dapatkan bukan sekedar teori saja, saya langsung dapat melihat perkembangan dan secretnya. Apalagi dengan studi banding keluar negeri dapat mengobservasi pembuatan tempe yang lebih modern dan juga mengetahui selera, cara dan manajemen negara. Saya harap program studi banding akan terus dilaksanakan ke

hanya di dalam negeri, tetapi juga keluar negeri” (Wawancara hari Rabu, 20 Februari 2014)

Pendidikan dan pelatihan serta program studi banding diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia para pengusaha, sehinggadengan meningkatnya kemampuan SDM dalam produksi, manajemen maupunpemasaran maka akan dapat mengembangkan usaha,serta mampu untuk meningkatkan daya saing usaha tersebut.

3) Pengembangan Teknologi dan Peralatan

Industri tempe, merupakan kerajinan tangan sederhana,dan kebanyakan mengandalkan teknologi sederhana. Peralatan yang digunakan untuk menunjang proses produksi masih merupakan peralatan yang sederhana dan menggunakan teknologi tepat guna. Untuk lebih meningkatkan kualitas produk yang dibuat, diperlukan teknologi dan peralatan penunjang yang lebih baik dan modern. Kualitas barang yang baik akan mampu untuk meningkatkan daya saing produk. Namun demikian, para pengusaha kecil yang hanya mempunyai modal terbatas, tidak selalu dapat menyediakan peralatan dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksinya dari segi kuantitas maupun kualitas.

Berkaitan dengan pengembangan teknologi dan peralatan, Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat , memberikan bantuan peralatan kepada pengusaha kecil. Pada tahun 2001 memberikan bantuan peralatan berupa mesin, mesin pengolah bahan kepada para pengusaha kecil. Pemberian bantuan mesin dan peralatan ini diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Setyo Budi dalam wawancara berikut:

“Pihak Dinas Pernah memberikan bantuan peralatan, pada tahun 2001, yaituberupa mesin pemanas, dan mesin pengolah bahan. Pemberian bantuanperalatan kepada para pengusaha kecil diberikan agar para pengusaha kecil dapat lebihmeningkatkan produksinya”(Wawancara hari Senin,14 April 2014)

Pada tahun 2005 Pemkab Kotawaringin Barat melalui dinas juga memberikan bantuan berupa peralatan penunjang pemasaran, yaitu berupa Papan Nama yang berbentuk kotak dan diterangi lampu neon di setiap *showroom*, serta rak *display* untuk memajang produk tempe olaha. Bantuan *neon boks* dan *rakdisplay* diharapkan semakin memacu untuk menghasilkan produk yang bermutu dan disukai masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Setyo Budi dalam wawancara berikut:

“Selain peralatan produksi, Dinas juga memberikan bantuan peralatan untukmemamerkan hasil produk para pengusaha kecil, yaitu berupa rak display, danneon boks melalui paguyuban” (Wawancara hari Senin,14 April 2014)

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Syamsul Arifin, selaku KetuaPaguyuban dalam wawancara berikut:

“Para pengusaha kecil juga mendapatkan bantuan dari Dinas Berupa mesinpemanas dan mesin pengolah bahan, kedua mesin tersebut sangatbermanfaat dalam proses produksi yang kami lakukan. Karena mampuuntuk meningkatkan jumlah produk yang kami hasilkan. Selain itu,dengan pemberian bantuan berupa rak dan neon boks, membuat shoowroom kami jadi terlihat lebih bagus” (Wawancara tanggal 25 April 2014)

Selain Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat , pemberian bantuan untukmeningkatkan kemampuan teknologi para pengusaha kecil juga dilakukan oleh dinas terkait Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memberikan bantuan berupa pengadaan peralatanproduksi antara lain timbangan, saringan atau ayakan, dan alat uji bahan. Seperti yang diutarakan oleh Staff Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM dalam wawancara sebagaiberikut:

“Untuk membantu para pengusaha kecil, kami memberikan bantuan peralatan untuk kegiatan produksi, antara lain timbangan, saringan, dan juga alat uji bahan” (Wawancara hari Selasa, 4 April 2014)

Pengembangan teknologi dan peralatan dengan pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga produk yang dihasilkan akan lebih banyak dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasaran.

4) Penyediaan Bahan Baku

Salah satu upaya Dinas Koperasi, Pasar Dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberdayakan industri keripik tempe agar dapat meningkatkan daya saing adalah dengan menyediakan bahan baku berkualitas yang dibutuhkan bagi para pengusaha kecil, melalui dinas terkait Kabupaten Kotawaringin Barat. Bahan baku tersebut berasal didatangkan dari berbagai daerah, baik di Kabupaten Kotawaringin Barat, maupun di daerah lain. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya penyediaan bahan baku yang berkualitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu staff Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat berikut:

“Tugas BTK Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mengolah bahan baku mentah yang didapat dari para pengusaha kecil dapat membeli bahan baku tersebut sesuai dengan yang mereka butuhkan, tetapi juga tidak semua pengusaha kecil membeli bahan baku, ada juga yang membeli dari pedagang. Semuanya terserah saja, kami hanya memfasilitasi saja.” (Wawancara, 13 April 2014)

Kemudahan dalam memperoleh bahan baku tersebut sangat bermanfaat bagi pihak pengusaha kecil, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani, Pemilik Yan's Keripik Tempe dalam wawancara berikut:

"Permasalahan bahan baku tidak menemui kesulitan walau kedelai sulit tapi kami dibantu oleh dinas terkait dalam pengadaannya"(wawancara tanggal 25 April 2014)

Dengan menyediakan bahan baku bagi para pengusaha kecil, maka akan mempermudah para pengusaha kecil dalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan. Sehingga para pengusaha kecil tidak kesulitan dalam mencari bahan baku yang berkualitas, karena telah dibantu oleh Pihak terkait. Dengan adanya bahan baku yang berkualitas, maka akan dapat meningkatkan daya saing produk.

Bahan baku usaha pembuatan tempe adalah kedelai. Selain bahan baku kedelai masih diperlukan tambahan beberapa bahan pembantu yang sering digunakan untuk pembuatan usaha pembuatan tempe antara lain sebagai berikut: plastik packing, ragi dan lain-lain.

Alat produksi yang digunakan oleh usaha pembuatan tempe terdiri dari alat-alat yang masih sederhana tetapi ada juga yang sudah modern. Alat-alat usaha pembuatan tempe tersebut antara lain : Mesin Giling dan Pemecah Kulit Kedelai. Mengenai produksi dan teknologi industri usaha pembuatan tempe yang digunakan terdiri dari alat sederhana dan modern, seperti dituturkan oleh Suwadji.

Umur 29 tahun pengrajin usaha pembuatan tempe Madurejo sebagai berikut :

"Perkembangan usaha para pengrajin saat ini sudah lain dengan dulu. Sebagian pengusaha memiliki alat-alat produksi yang modern, sehingga kalau dibidang modern alat-alat produksinya masih banyak yang sederhana, dibidang sederhana, kenyataannya mereka menggunakan alat-alat modern" (Wawancara 6 April 2014)

Hal senada juga disampaikan oleh Agung umur 38 tahun, staf Kelurahan Madurejo sebagai berikut:

"Selama saya menjabat sebagai staf Madurejo, usaha usaha pembuatan tempe mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Rata-rata para pengusaha sudah memiliki alat-alat modern namun untuk yang butuh biaya besar hanya sebagian yang memiliki seperti mesin giling" (Wawancara 6 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal produksi dan teknologi para pengusaha usaha pembuatan tempe ini memberdayakan dirinya untuk memiliki alat-alat produksi yang modern. Namun semuanya tidak terlepas dari factor modal yang mereka miliki guna pengembangan usahanya. Untuk memperoleh hasil dengan penampilan yang menarik diperlukan kreatifitas dari para pengusaha dalam melakukan finishing.

Apabila usaha pembuatan tempe sudah diselesaikan, dalam artisetengah jadi, tahap terakhir untuk menambah keindahan penampilan sebuah usaha pembuatan tempe yang siap dipasarkan kemasaryakat adalah dengan cara memberikan kemasan. Mengenai mutu produksi usaha pembuatan tempe Madurejo tidak kalah dibandingkan dengan usaha pembuatan tempe kabupaten lain. Bahkan banyak pembeli yang memilih usaha pembuatan tempe produksi Madurejo, mengingat bahan bakunya asli dari kedelai. Memang diakui bahwa belum memiliki ciri tersendiri (kekhasan) namun sudah dapat mengerjakan proses pembuatan tempe.

Usaha usaha pembuatan tempe di Kelurahan Madurejo sudah berjalan bertahun-tahun sehingga dalam hal pengadaan bahan baku, para pengusaha tidak mengalami kendala yang berarti. Bahan baku utama berupa kedelai mereka dapatkan dari berbagai pasar dengan cara pembelian yang lebih didahului

dengan pemesanan.

Kerjasama dan hubungan pribadi yang baik antar sesama pengusaha Tempe telah terjalin sejak lama, hal ini dibuktikan dalam hal pengadaan bahan baku. Apabila ada pengusaha yang memperoleh order besar sedangkan persediaan bahanbaku sudah menipis maka para pengusaha tersebut dapat meminjam bahan baku dari pengusaha lain yang belum dimanfaatkan.

Pemberdayaan teknologi dan produksi dimaksudkan untuk mendorong agar para pengusaha industry kecil mempunyai kemampuan dibidang teknologi. Dengan kemampuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan dan menciptakan nilai tambah bagi pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas yang pada akhirnya dapat mewujudkan efisiensi dan produktivitas yang tinggi serta memiliki daya saing yang tinggi.

Program pelatihan teknologi bagi para pengusaha industry kecil Tempe Madura pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Seperti yang telah dialami oleh Suwadi yang telah mengikuti program pelatihan di Propinsi Kalimantan Tengah. Suwadi, umur 29 tahun, pekerjaan pengrajin usaha pembuatan tempe, menegaskan sebagai berikut:

“Saya sudah mengikuti pelatihan berkali-kali, tetapi yang paling berkesan ada 2 pelatihan yaitu pelatihan ketrampilan bagi Karang Taruna tingkat propinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial tahun 1996 dan Pelatihan Tata Letak (*layout*) Peralatan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh BLK bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2005”. (Wawancara 6 April 2014).

Selanjutnya menurut penuturan Suwadi dikatakan bahwa di Kelurahan Madura saat ini sedikit sekali adanya pengangguran dan boleh dibilang ditempat kerjanya merupakan sekolah bagi pekerja, sebab rata-rata setelah mereka

belajar bekerja ditempatnya selanjutnya mereka pulang kembali, untuk mendirikan usaha sendiri. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan industry kecil, khususnya pada bidang teknologi dan produksi, telah banyak dilakukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi maupun pelaksanaan studi banding ke daerah lain, sebagaimana dituturkan Kabid Perekonomian Bappeda sebagai berikut :

"Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berusaha membantu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan industry kecil. Dalam hal pengembangan teknologi dan produksi misalnya telah dijalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yaitu dengan Universitas Anta Kusuma dalam hal produk unggulan". (Wawancara 8 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara nampak bahwa pelatihan SDM oleh pemerintah dalam hal teknologi dan produksi masih sangat diperlukan dalam rangka pengembangan usaha usaha pembuatan tempe.

5) Pengembangan Pemasaran

Pemasaran merupakan faktor penting dalam suatu usaha karena strategipemasaran akan mempengaruhi tingkat penjualan produk yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan yang diterima pengusaha dan juga akan mempengaruhi keberlanjutan proses produksi yang akan datang. Pemasaran juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk. Apabila strategi yang dilakukan baik dan dapat menarik minat pasar, maka penjualan akan meningkat, dan produk menjadi lebih dikenal, begitu pulasebaliknya. Berkaitan dengan pemasaran produk tempe, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dengan meningkatkan akses penjualan kepada pasar.

Untuk meningkatkan akses kepada pasar, dilakukan dengan cara mempromosikan produk. Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat mengikutsertakan wakil pengusaha kecil dan beberapa UKM lainnya yang terpilih dalam misi dagang dan pameran yang diadakan oleh pemerintah.

Pameran-pameran tersebut diadakan minimal satu tahun sekali sebagai cara memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gunari Staff Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM kepada industri kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk juga industri tempe, salah satunya adalah mengikutsertakan hasil produk tempe dalam acara pameran-pameran, dengan tujuan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat serta pengunjung dari luar negeri. Selain itu juga bermanfaat untuk membuka pasar” (Wawancara hari Selasa, 25 April 2014)

Lebih lanjut Bapak Gunari, juga menjelaskan jenis-jenis pameran yang diikuti oleh para pengusaha industri kecil, dalam wawancara berikut:

“Jenis Pameran yang dapat diikuti oleh para pengusaha industri kecil banyak sekali jenisnya, diantaranya Pameran oleh Departemen Perdagangan: PPE (Pameran Produksi Ekspor) di Jakarta yang diadakan oleh Departemen Perdagangan; Pameran SMESCO (*Small and Medium Enterprises Cooperation*) di Jakarta yang diadakan oleh Departemen Koperasi Pusat” (Wawancara hari Selasa, 25 April 2014)

Pengembangan pemasaran melalui pameran yang dilakukan oleh Dinas tersebut, ternyata cukup berhasil dan membawa manfaat yang besar dalam memperkenalkan serta memasarkan produk. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani dalam wawancara berikut:

“Pameran yang diadakan oleh Pemerintah memang membawa manfaat dan keuntungan yang cukup besar untuk kelangsungan usaha saya, karena dengan adanya pameran-pameran tersebut, maka akan meningkatkan omzet penjualan, bahkan dengan adanya pameran, saya pernah beberapa kali mendapatkan *buyer* dari luar negeri, yang membeli produk saya dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa produk tidak kalah dengan produk-produk lainnya” (Wawancara di Yan’s Kripik Tempe pada tanggal 3 April 2014)

Pengembangan pemasaran juga dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan berkaitan dengan penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Setyo Budi, sebagai berikut:

“Salah satu pelatihan yang pernah kami laksanakan adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi internet, kita bisa membuat situs di internet untuk mempromosikan produk para pengusaha kecil termasuk”. (Wawancara hari Senin, 14 April 2014)

Pengusaha kripik tempe di Kelurahan Madurejo yang telah menggunakan fasilitas internet dalam upaya mengembangkan usahanya yaitu Ibu Sri Handayani, pemilik Yan’S Kripik Tempe. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani dalam wawancara berikut:

“Berdasarkan pelatihan yang saya dapatkan, saya kemudian berinisiatif untuk membuat *website* sendiri dalam mengembangkan pemasaran, dan saya sudah punya *website* sendiri alamatnya di www.yanskeripik.com. Harapan saya, semoga dengan saya mempunyai website ini, masyarakat akan mengetahui keberadaan usaha saya” (wawancara tanggal 3 April)

Dengan memanfaatkan jaringan internet, akan memudahkan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, bukan saja dalam cakupan nasional, tetapi juga cakupan internasional, sehingga merupakan salah satu dukungan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar dunia.

Pemasaran usaha pembuatan tempe Madurejo dilakukan dengan cara dipasarkan sendiri ke masyarakat atau dengan menjalin kemitraan dengan para tengkulak melalui toko-toko atau warung khusus produk tempe. Tidak semua pengusaha industri Tempe Madurejo memiliki toko. Akan tetapi mayoritas pemilik toko yang ada di Madurejo tidak memproduksi sendiri usaha pembuatan tempe yang dipasarkan. Pemilik toko yang tidak memproduksi sendiri usaha pembuatan tempe mendapat barang dagangannya dari pengusaha yang tidak memiliki toko. Pemilik toko inilah yang memberikan pesanan usaha pembuatan tempe yang dibutuhkan pelanggan dan pemakai.

Sedangkan mengenai pemasaran hasil produksi bagi pengusaha industri kecil usaha pembuatan tempe Madurejo, dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan menunggu calon pembeli di rumah/tempat pembuatan usaha pembuatan tempe, mengingat para pengrajin tersebut tidak memiliki toko usaha pembuatan tempe sendiri. Seperti dituturkan oleh Suwadji umur 28 tahun pengrajin usaha pembuatan tempe Madurejosebagai berikut:

"Masalah pemasaran usaha pembuatan tempe sudah ada pembeli yang datang langsung ketempat saya dengan harga yang sesuai dengan model dan kualitas produk yang dibuat. Untuk pemasaran ditoko tidak pernah saya lakukan karena butuh modal ganda"(Wawancara tanggal 6 April 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dikemukakan bahwa dalam hal pemasaran usaha pembuatan tempe para pengusaha usaha pembuatan tempe tidak mengalami kendala yang berarti mereka mempunyai jalur pemasaran sendiri-sendiri, baik melalui jalinan kemitraan dengan para tengkulak, dipasarkan sendiri, dijual ke toko-toko usaha pembuatan tempe.

Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha usaha pembuatan tempe telah memiliki kepedulian terhadap pengembangan usaha khususnya dalam hal pemasaran namun belum bias maksimal, sehingga masih diperlukan campurtangan dari pemerintah. Pemberdayaan pengusaha industry kecil dalam bentuk pemasaran dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan pengembangan pemasaran hasil industry baik melalui pasar lokal, pasar regional maupun pasar ekspor guna kelangsungan usahanya. Model pemasaran yang telah dilakukan oleh para pengusaha industri kecil usaha pembuatan tempe Madurejo dilakukan dengan system kemitraan pola dagang dengan para pemilik took usaha pembuatan tempe, pedagang perantara dan pedagang. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua hasil industry kecil usaha pembuatan tempe bisa lancar dipasarkan.

Namun disisi lain telah diketahui bahwa industry kecil Tempe merupakan salah satu jenis produk unggulan daerah yang perlu ditumbuh kembangkan. Melihat kondisi yang demikian, pemerintah memandang perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk pemasaran produk tersebut. Bentuk peniasaran produk usaha pembuatan tempe Madurejo yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui pemberian bantuan dan kesempatan seluas-luasnya dalam mempromosikan produksi tersebut.

Kegiatan promosi tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengikut sertakan para pengusaha industri kecil usaha pembuatan tempe dalam berbagai even pameran, baik pameran yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun tingkat nasional.

Dalam penyelenggaraan pameran yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat disediakan stand - stand khusus yang diperuntukkan bagi para pengusaha industri kecil Tempe. Mengkaji beberapa uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa strategi pemberdayaan industri kecil adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan kegunaan sumberdaya yang tersedia baik sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya keuangan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi, memiliki ketangguhan serta kemandirian.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan Industri Keripik Tempe Agar Dapat Meningkatkan Daya Saing

Proses pemberdayaan industri keripik tempe yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor pendukung dan penghambat tersebut antara lain:

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan industri agar dapat meningkatkan daya saing terdiri dari faktor pendukung internal, yaitu faktor pendukung yang berasal dari dalam para pengusaha kecil dan faktor pendukung eksternal, yaitu faktor pendukung yang berasal dari luar para pengusaha kecil.

1) Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung dalam pemberdayaan industri tempe dapat meningkatkan daya saing antara lain masih tersedianya bahan baku serta tenaga kerja yang terampil dan mudah dilatih

a) Bahan Baku Yang Masih Cukup Tersedia

Ketersediaan bahan baku yang cukup dan berkualitas merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari industri kecil. Industri tempe sebagai salah satu industri kecil juga mengandalkan adanya ketersediaan bahan baku yang cukup untuk keberlanjutan kegiatan produksinya. Bahan baku industri tempe adalah kedelai mudah didapatkan dan tersedia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya.

Masih cukup tersedianya bahan baku untuk pembuatan produk merupakan salah satu faktor yang membuat para pengusaha kecil optimis akan keberlanjutan usaha tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Syamsul Arifin, pemilik usaha berikut:

“Saya percaya bahwa usaha yang saya tekuni ini masih mampu untuk dilanjutkan karena bahan baku yaitu kedelai mudah didapatkan dan banyak tersedia, jadi saya tidak perlu khawatir jika kehabisan bahan baku” (Wawancara, 20 April 2014)

Masih tersedianya bahan baku yang cukup untuk melanjutkan produksi juga didukung oleh Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam wawancara dengan staff dinas Kabupaten Kotawaringin Barat berikut ini:

“Sampai saat ini ketersediaan bahan baku tersedia langsung dari para pedagang bahan baku masih cukup banyak dengan kualitas yang beragam, tergantung pada yang dibutuhkan oleh para usaha ini, kami juga tidak pernah kesulitan dalam memperoleh bahan baku, terbukti bahwa para pengusaha tidak pernah mengeluh kekurangan bahan baku” (Wawancara Selasa, 4 Maret 2014)

Dengan masih banyak tersedianya bahan baku, akan menunjang keberlanjutan industri keripik tempem menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan daya saing.

b) Tenaga Kerja Yang Terampil Dan Mudah Dilatih

Industri tempem yang berjalan turun-temurun, memudahkan para pengusaha kecil untuk mewariskan keahlian kepada keturunannya, sehingga keahlian usaha terdahulu tidak hilang begitu saja dan tetap lestari ketika meninggal dunia. Para pengusaha yang sudah mengetahui teknik pembuatan sejak usia dini mampu meningkatkan keahlian dan ketrampilannya untuk mengembangkan industri tempem menjadi lebih baik lagi. Proses pembuatan yang merupakan kerajinan tangan sederhana, dan kebanyakan mengandalkan ketrampilan tangan. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan untuk menunjang proses produksi merupakan peralatan yang sederhana dan menggunakan teknologi tepat guna. Peralatan yang masih sederhana tersebut memudahkan para pengusaha kecil untuk menggunakannya, sehingga dalam proses pembuatan tidak terlalu menemui kesulitan dalam menggunakan peralatannya.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Siono pemilik SN Keripik dalam wawancara berikut:

“Untuk masalah tenaga kerja, saya tidak menemui kesulitan, karena para pekerja dan pengusaha sudah terampil. Ya, paling tidak dasarnya membuat, karena mereka biasanya sudah memiliki bakat alam untuk membuat dan lagi, dulunya kebanyakan orang tua mereka juga pengusaha tempem, jadi bisa disalurkan secara turun-temurun. Tinggal diasah saja dalam hal kreativitas membuat, karena kita juga harus menyesuaikan dengan keinginan pasar” (Wawancara hari Sabtu, 23 April 2014)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Sony Soeharto, pemilik usaha, dalam wawancara berikut:

“Salah satu faktor pendukung usaha saya ini adalah tenaga kerja yang sudah memiliki ketrampilan, jadi dalam mengembangkannya saya tidak menemui kesulitan, karena dasar pembuatan sudah mereka kuasai. Jadi, tinggal dilatih untuk mengembangkan kreativitas mereka saja, agar dapat mengikuti perkembangan pasar” (Wawancara 23 April 2014)

Dengan masih banyaknya tenaga terampil dan mudah dilatih terutama dari segi teknik produksi menunjukkan bahwa industri tempemasi mampu bertahan dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik, sehingga pemberdayaan industri tempe yang juga ditujukan untuk mengembangkan dan melestarikan ketrampilan, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri.

2) Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal adalah melalui sektor pariwisata yang merupakan industri penarik dalam meningkatkan daya saing Sektor Pariwisata. Merupakan Industri Penarik dalam Meningkatkan Daya Saing. Faktor pendukung eksternal dalam pemberdayaan industri keripik tempe adalah dari sektor pariwisata yang merupakan industri penarik yang cukup besar untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan daya saingnya.

Keripik tempe biasanya dibeli untuk buah tangan atau souvenir. Masuknya bidang industri dan pariwisata merupakan keuntungan tersendiri, karena sektor pariwisata dapat menjadi pendorong dalam memasarkan produk. Apalagi dengan telah dicanangkannya Sentra industri keripik tempe sebagai kampung wisata, menunjukkan bahwa pemberdayaan industri tempe juga dapat dilakukan melalui sektor pariwisata.

Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Syamsul Arifin, pemilik *Store Keripik Tempe* bahwa:

“Keripik tempe dapat menjadi salah satu pendukung sektor pariwisata. Karenabanyaknya orang-orang yang datang untuk berwisata, akanmeningkatkan penjualan produk ini. Kalau sudahdemikian, produk tempe akan menjadi lebih dikenal masyarakat” (Wawancara hari Rabu, 20 April 2014)

Dengan demikian, maka pengembangan sektor pariwisata juga akanmenjadi salah satu pendukung pemberdayaan sentra industri kripik tempe agar dapat meningkatkan daya saing.

b. Faktor Penghambat

Upaya pemberdayaan yang dilaksanakan pada sentra industri tempe Kelurahan Madurejo tidak selalu berjalan seperti yang telah direncanakan. Faktorpenghambat dibagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat internal yang berasal dari para pengusaha dan faktor penghambat eksternal yagn berasal dari luar pengusaha kecil.

1) Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal berkaitan berkaitan dengan keterbatasanpermodalan, kultur usaha yang masih tertutup, dan kemampuan manajerialyang masih rendah

a) Keterbatasan Permodalan

Faktor penting dalam menjalankan usaha adalah ketersediaan biaya ataumodal yang cukup. Berdasarkan wawancara dengan para pengusaha,faktor utama yang menjadi kendala pengembangan usaha mereka adalahketerbatasan modal yang mereka miliki. Jalannya produksi akan terhambatjika kekurangan

biaya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani, pemilik Yan`S Kripik Tempe dalam wawancara berikut:

“Pemasukan yang saya miliki untuk menjalankan usaha ini tergantung pada penjualan produk, jadi apabila produk terjual banyak, maka modal yang saya miliki untuk melakukan produksi lagi juga lumayan banyak, tapi kalau penjualan sedikit berkurang, saya juga agak kesulitan untuk memutar uang untuk kegiatan produksi selanjutnya, ditambah lagi sekarang harga BBM semakin mahal jadi, untuk pembakaran dan ongkos pengiriman barang juga jadi naik” (Wawancara 22 April 2014)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Eddy, Pemilik industri Tempe dalam wawancara berikut ini:

“Kendala yang sering saya hadapi, dan mungkin juga bagi kebanyakan pengusaha kecil disini dalam mengembangkan usaha adalah kita tidak punya modal yang cukup, jadi uang didapat dari hasil penjualan produk, produk laku, uangnya bisa digunakan untuk produksi selanjutnya, begitu seterusnya. Ditambah lagi dengan biaya yang semakin lama semakin meningkat. Sehingga, nantinya akan mempengaruhi penerimaan dari penjualan produk. Kalau saya ingin mengembangkan kreasi atau membuat bentuk baru, saya harus berfikir juga, ada atau tidak dana untuk produksinya” (Wawancara hari Sabtu, 23 April 2014)

Dengan demikian kebutuhan akan adanya modal yang cukup sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pemberdayaan industri keripik tempe agar dapat meningkatkan daya saingnya. Banyak usaha yang mempunyai kreativitas tinggi untuk mengembangkan industri kerajinannya, tetapi terhambat oleh keterbatasan biaya.

b) Kultur Pengusaha kecil Yang Masih Tertutup

Kultur pengusaha yang masih tertutup ini sangat mempengaruhi upaya pemberdayaan industri keripik tempe yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena diantara para pengusaha kecil, terdapat beberapa pengusaha kecil yang tidak mau mengikuti program-program dan kegiatan dari pemerintah. Para pengusaha kecil masih ada yang bersifat individual dan menutup diri, karena

mereka khawatir rahasia tentang ketrampilan yang dimiliki dan metode meraih kesuksesan yang telah mereka raih akan dibocorkan oleh pemerintah kepada pengusaha kecil lainnya.

Disisi lain, kondisi pengusaha kecil yang masih tertutup ini juga dapat mengakibatkan para pengusaha kecil enggan untuk mengikuti perkembangan duniayang terjadi diluar baik tentang teknologi, informasi, industri, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil sangat terbatas. Akibatnya, pengembangan industri kerajinan menjadi lambat, atau ketinggalan jaman.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Setyo Budi, staff Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Memang dalam pelaksanaan program pemberdayaan baik itu melalui pelatihan dan penyuluhan maupun dialog-dialog, tidak selalu berjalan lancar, terkadang juga ada pengusaha kecil yang menolak untuk mengikuti program-program tersebut, dengan alasan belum memerlukannya atau tidak mengetahui bagaimana proses atau metodenya. Sebenarnya, kalau mereka belum tahu, mereka seharusnya memanfaatkan berbagai pelatihan dan penyuluhan itu sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya”. (Wawancara, 25 April 2014)

Dengan kondisi para pengusaha kecil yang masih tertutup ini, maka upaya untuk meningkatkan daya saing usaha melalui program pemberdayaan akan terhambat, karena para pengusaha kecil tidak sepenuhnya mau untuk membuka diri dalam menerima perubahan ke arah yang lebih baik.

c) Kemampuan Manajerial Yang Masih Rendah

Kemampuan manajerial pengusaha kecil yang masih rendah dalam menyusun rencana serta investasi maupun orientasi penjualan dari tahun ke tahun juga menjadi penghambat dalam peningkatan daya saing, karena dari

segiwirausaha para pengusaha kecil belum sepenuhnya bisa mengatur. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Gunari, staff bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat dalam wawancara sebagai berikut:

"Hampir semua industri kecil, termasuk industri tempe, lemah dalam segi manajerial. Mereka belum mampu mengatur omzet penjualan, atau menata administrasi keuangan dengan baik. Yang penting barang yang diproduksi tersebut laku dan terjual sehingga modalnya kembali dan bisa melanjutkan memproduksi lagi" (Wawancara hari Selasa, 25 April 2011).

Dengan masih rendahnya kemampuan para pengusaha kecil tersebut, maka dalam upaya peningkatan daya saing masih terkendala oleh kemampuan para pengusaha kecil dalam hal manajerial yang masih rendah.

2) Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal berkaitan dengan Keterbatasan anggaran, dan Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.

a) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan program-program pemberdayaan dan kegiatan pemerintah sebagian ada yang masih bersifat insidental dan belum berkesinambungan. Karena keterbatasan dana pula, maka pemberdayaan industri kecil tidak hanya ditujukan untuk industri tempe, tetapi menyeluruh untuk industri kecil lainnya. Anggaran untuk pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat untuk industri tempe dan industri kecil lainnya diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang sebelumnya diajukan melalui penyampaian proposal kegiatan untuk satu tahun ke depan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunari, Staff Bidang

Koperasidan UKM Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa:

“Dana untuk program pembinaan dan pengembangan industri kecil itutergantung pada Pemerintah Daerah, seberapa besar jumlahnya, karenadana dari APBD juga tidak hanya untuk program pemberdayaan industrikecil saja, tetapi juga dibagi-bagi dengan kegiatan lain yang membutuhkan biaya.(Wawancara, 25 Maret 2014).

Lebih lanjut lagi, dikatakan oleh Bapak Gunari bahwa:

“Biasanya dana pembinaan dari Pemerintah Daerah digunakan untukkegiatan pelatihan bagi semua pengusaha industri kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diadakan dua hingga tiga kali dalam setahun dengan tema yang sama pada tahun tersebut, tetapi materi yang berbeda-beda. Pesertyaadalah para pengusaha industri kecil dengan jumlah sekitar 60 pengusaha, termasuk juga para pengusaha keripik”. (Wawancara, 25 Maret 2014).

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Setyo Budi, Staff Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat , dalam wawancara berikut:

“Untuk anggaran program pemberdayaa bagi industri kecil, pihak Dinastidak dapat menentukan berapa pastinya, setiap tahunjumlahnya berbeda-beda, semua dana tergantung dari kebijakanPemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat , berapa mereka akan memberikan kepada kami. Biasanya jumlahnya berbeda jauh dengan jumlah yang kamiajukan dalam proposal kegiatan, dan lebih sedikit, karena uang yang dimiliki oleh Daerah juga harus dibagi-bagi, tidak hanya untuk danapemberdayaan dan pengembangan industri kecil saja, jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa” (Wawancara hari Jum`at, 6 April 2014).

Dengan terbatasnya anggaran yang dibutuhkan, maka pelaksanaanprogram dan kegiatan pemberdayaan industri tempeakan terhambat pula. Karena untuk melaksanakan program-program dankegiatan pemberdayaan dan pengembangan industri kecil, termasuk juga industri tempe, diperlukan pendanaan yang cukup agarsemua program dapat berjalan dengan baik serta dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

b) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Belum Memadai

Pemasaran industri tempedi kelurahan Madurejo kebanyakan hanya di Showroom-showroom yang letaknya didaerah sentra tersebut. Hambatan utamanya adalah lokasi Sentra Industri yang letaknya tidak berada di jalan utama, tetapi masuk ke gang-gang kecil. Keadaan yang ramai serta jalan masuk kesentra industri keripik tempe yang sempit menjadi kendala utama

pemasaran. Karena mobil-mobil pribadi yang ingin melihat-lihat sentra industri keripik tempe tidak dapat leluasa untuk memasuki area tersebut. Selain itu, bis-bis pariwisata yang mengangkut

para wisatawan tidak dapat memasuki lokasi sentra industri.

Apabila bis tersebut hendak parkir di sepanjang jalan, maka akan mengganggu arus lalu lintasnya. Hanya mobil pengangkut barang yang mengambil barang yang dapat memasuki lokasi

sentra. Hal tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Syamsul

Arifin sebagai berikut:

“Keberadaan lokasi sentra ini yang masuk gang-gang kecil menghambat para turis yang ingin melihat-lihat disini, karena tidak ada tempat parkirnya. selain itu lokasinya juga tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang berkunjung ke kota. Walaupun oleh pemerintah sudah diberi tanda di depan gang, tetapi menurut saya, tanda itu kurang terlihat oleh masyarakat yang melalui jalan” (Wawancara, 20 April 2014)

Dengan terbatasnya infrastruktur jalan, maka akan menghambat pula jalannya proses distribusi barang yang ada di sentra Industri, sehingga akan menghambat pengembangan usaha.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Dinas Koperasi, Pasar Dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pemberdayaan Industri Tempe Agar Dapat Meningkatkan Daya Saing

1) Pembinaan Permodalan

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, suatu perusahaan baik itu industri kecil, menengah maupun besar, harus memperhitungkan faktor keuangan yang mereka miliki, atau biasa disebut dengan modal. Modal adalah faktor yang sangat penting dalam kegiatan produksi baik bagi industri besar maupun industri kecil, karena setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan adanya modal, mulai dari membeli bahan baku dan peralatan, biaya pemasaran serta membayar gaji karyawan. Kebutuhan akan adanya kesediaan modal tergantung pada besar kecilnya suatu usaha yang dijalankan. Semakin besar usaha yang dijalankan, maka akan semakin besar pula tingkat kebutuhan modalnya.

Pada industri kecil, seringkali para pengusaha mengalami kekurangan modal untuk menjalankan usaha. Hal ini disebabkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara uang pribadi dan uang perusahaan. Para pengusaha industri kecil cenderung untuk menggabungkan keuangan untuk kebutuhan pribadi dan keuangan perusahaan, sehingga terkadang keuangan perusahaan akan ikut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya modal yang diperoleh dari hasil usaha tidak dapat diputar untuk kegiatan produksi berikutnya.

Selain itu, lemahnya permodalan industri juga disebabkan pada awalnya mereka mendirikan usaha dengan modal pribadi, sebagaimana diungkapkan oleh Kuncoro (2003, h. 383) bahwa salah satu karakter industri kecil adalah rendahnya akses industri terhadap lembaga-lembaga kredit formal. Sehingga sumber modal industri terutama lebih banyak berasal dari modal sendiri dan sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir.

Kondisi permodalan yang dihadapi para pengusaha industri kecil tersebut, mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai macam fasilitas agar para pengusaha industri kecil mampu meningkatkan modal yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian tambahan modal sangat diperlukan bagi para pengusaha kecil selain modal yang berasal dari kekayaan pribadi, agar dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Sehingga upaya untuk mendorong, memotivasi serta memfasilitasi para pengusaha industri kecil dalam meningkatkan aksesibilitas permodalan sangat diperlukan. Apabila pihak pengusaha kecil telah kuat dalam segi permodalan, maka dalam mengembangkan usaha akan lebih mudah, karena telah mempunyai cukup modal.

Peran Dinas Koperasi, Pasar Dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan masalah permodalan yang dialami oleh para pengusaha kecil adalah sebagai fasilitator dengan membantu para pengusaha kecil dalam memperoleh modal melalui pembinaan, dimana dalam pembinaan tersebut diarahkan bagaimana agar para pengusaha kecil dapat memperoleh keringanan kredit lunak dari pihak perbankan, serta tata cara dan metode yang harus dilakukan untuk memperoleh kredit, antara lain melalui pembuatan proposal.

Hal ini sejalan dengan peran pemerintah khususnya Dinas Koperasi, Pasar dan UKMKM yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 22 bahwa untuk meningkatkan akses industri kecil terhadap pembiayaan dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri
- b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan
- c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan
- d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjaminan

Dengan adanya pembinaan di bidang permodalan, diharapkan para pengusaha kecil mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kredit dari bank, sehingga dapat mengembangkan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Namun demikian, berdasarkan penelitian pelaksanaan pembinaan dibidang permodalan dirasa belum mendapat respon yang positif dari para pengusaha kecil. Hal ini terbukti dengan masih minimnya pengusaha kecil yang mengikutisaran atau langkah-langkah yang telah diberikan oleh Dinas untuk bisa mendapatkan kredit bagi pengembangan usahanya. Beberapa pengusaha kecil berpendapat bahwa perlakuan pengajuan kredit pinjaman berbagai metode adalah sama saja. Apalagi dengan persyaratan yang sangat banyak membuat mereka enggan untuk mengajukan kredit permodalan kepada pihak bank. Para pengusaha kecil masih mengandalkan permodalan dari pendapatan mereka sendiritanpa harus meminjam kepada pihak perbankan.

Di sisi lain, sikap para pengusaha kecil tersebut menunjukkan bahwa para pengusaha kecil telah berusaha untuk mandiri dalam mengembangkan usahanya, tetapi perlu diingat bahwa untuk dapat meningkatkan daya saing suatu produk industri, harus pula didukung dengan permodalan yang kuat agar mampu mendukung dalam penyediaan bahan baku, sumber daya manusia, teknologi, serta pemasaran yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan daya saing para pengusaha kecil juga harus mampu mengembangkan manajemen usahanya dalam hal permodalan, sebagaimana diutarakan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002, h. 256), yaitu mencakup kapan diperlukan tambahan modal dan seberapa besarnya; dimana akan dapat diperoleh tambahan modal tersebut; dan siapa yang perlu dihubungi yang dapat membantu permodalan.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Karakteristik industri kecil yang bersifat padat karya ternyata tidak sebanding dengan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Tulus Tambunan dalam Mahmud Thoha (1998, h. 72) bahwa salah satu kelemahan industri kecil adalah di bidang SDM termasuk juga *managerial skill* yang rendah, jiwa kewiraswastaan yang lemah, etos, motivasi dan tingkat disiplin yang rendah. Sedangkan keahlian SDM tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

Sehingga untuk dapat meminimalisir kendala yang dihadapi industri kecil agar dapat mempertahankan serta memperbaiki kualitas produk dan memperluas pasar, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing adalah dengan memberikan pelatihan secara langsung kepada para pengusaha kecil, karena sangat penting dan merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha maupun pekerja industri kecil. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknik produksi, manajemen dan pemasaran sebagai upaya pemberdayaan industri tempe, agar para pengusaha kecil mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Program pembinaan dan pengembangan yang selama ini diberikan oleh Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait merupakan salah satu upaya pemberdayaan industri keripik tempe untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. Tidak dapat dihindari bahwa agar dapat meningkatkan daya saing industri kecil, maka peningkatan teknis dan non teknis yang dimiliki oleh para pengusaha, pengusaha kecil dan pekerja industri kecil harus juga ditingkatkan dan dikembangkan.

Sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Dipta (2005) yang mengemukakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi daya saing UKM adalah berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan pemilik, pengelola, dan karyawan dalam teknologi, pemasaran, manajemen serta kemampuan membuat perencanaan dan investasi untuk jangka panjang.

Dalam upaya peningkatan daya saing, para pengusaha kecil juga membutuhkan kemampuan merencanakan pengembangan usaha. Yang dijelaskan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002, h. 254-256) bahwa dalam bidang sumber daya manusia, perlu adanya perencanaan yang mencakup : (a) Bekal ketrampilan apa yang perlu dikembangkan; (b) Pihak mana yang bisa diajak bekerjasama untuk menambah ketrampilan, baik bagi karyawan maupun pimpinan (pemilik); (c) Berapa tambahan pegawai yang diperlukan; (d) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Keikutsertaan para pengusaha kecil dalam studi banding yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM bersama-sama dengan pengusaha industri kecil lainnya juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai hal baik dari segi produksi, manajemen maupun pemasaran. Metode ini dilaksanakan karena melihat bahwa hampir semua pengusaha industri kecil sulit untuk menerima perubahan yang terjadi apabila belum ada bukti bahwa perubahan tersebut menguntungkan. Untuk itu, dilaksanakan metode studi banding, dengan harapan para pengusaha kecil mendapatkan ilmu dari pengalaman pengusaha kecil lainnya.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan serta studi banding, diharapkan para pengusaha kecil mampu untuk merencanakan dan meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia maka berangsur-angsur usaha ini akan menuju ke arah pengembangan yang lebih baik lagi dalam segi penguasaan manajemen, pengembangan desain, serta metode pemasaran, sehingga apabila SDM nya telah berkualitas, maka daya saingnya pun akan meningkat. Sebagaimana pendapat Menteri Koperasi dan pembinaan Usaha Kecil, Subiarto Tjakrawerdya, SE (Menteri yang menjabat waktu itu) pada tanggal 22 Juli 1993, mengemukakan bahwa arah dan tujuan pengembangan industri kecil dari segi tinjauan individual meliputi:

- a. Peningkatan pangsa pasar yang lebih luas;
- b. Peningkatan daya saing dan efisiensi usaha;
- c. Menuju kesinambungan usaha secara jangka panjang dengan membangun "CITRA" usaha dan perusahaan.

3) Pengembangan Teknologi dan Peralatan

Tulus Tambunan dalam Mahmud Thoha (1998, h. 92) dan Christian Limpellius dan Gert Thoma dalam Kartasapoetra (1986) menjelaskan bahwa masalah yang membelit perkembangan industri kecil salah satunya adalah kelemahan di bidang teknologi produksi. Proses produksi hanya menggunakan alat seadanya, desain produk terbatas dan tidak berkembang, kualitas produksi rendah, kapasitas produksi terbatas, tidak ada standarisasi, daya saing rendah.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan teknologiproduksi, dan agar dapat meningkatkan daya saing suatu produk, makapengembangan teknologi merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan rendahnya produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Selain itu, teknologi jugamerupakan faktor yang berpengaruh dalam persaingan di pasar global sebagaimana diutarakan oleh Tambunan (2002, h. 80) teknologi merupakanfaktor keunggulan komparatif dan lebih penting dalam persaingan global.

Peran Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM dalam pemberdayaan industri kecil agar dapatmeningkatkan daya saing dalam pengembangan teknologi adalah dengan pemberian peralatan dan mesin. Bantuan berupa pemberian mesin produksitersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. Karena daya saing suatu produk juga diukur dari produktivitasnya. Tetapi pemberian bantuan berupa peralatan yang berteknologi tinggi, belum mampu dilakukan oleh Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM karenaterbentur permasalahan dana dan anggaran yang terbatas. Diharapkan dengantelah diberikannya bantuan peralatan untuk mengembangkan produksi, makapara pengusaha kecil akan lebih mampu untuk meningkatkan produksi barang secara efisien.

4) Penyediaan Bahan Baku

Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan daya saing suatu produk, sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Dipta (2005) bahwa keterandalan faktor-faktor produksi dan sumberdaya input merupakan faktor yang

mempengaruhi daya saing. Oleh karena itu penyediaan bahan baku yang cukup dan berkualitas akan dapat menunjang daya saing.

Dukungan dari dinas terkait Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap para pengusaha kecil dengan menyediakan bahan baku yang mereka butuhkan menunjukkan bahwa Pemerintah peduli dengan kelangsungan usaha, sehingga diharapkan dengan adanya dukungan tersebut, para pengusaha kecil mampu mengoptimalkan bahan baku yang telah diperoleh untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan produk sejenis dipasaran.

Agar dapat mengoptimalkan bahan baku yang digunakan, maka pihak pengusaha kecil juga perlu untuk merencanakan penggunaan bahan baku untuk kegiatan produksi. Sebagaimana diutarakan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002, h. 255) yang mencakup: (a) Dari bahan baku yang ada, bisakah dibuat produk lain, kapan akan dilaksanakan; (b) Berapa banyak produksi yang akan dibuat di masa mendatang; (c) Berapa banyak persediaan yang mencukupi kebutuhan tanpa berlebihan.

5) Pengembangan Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pemberdayaan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing. Jika tidak mempunyai kualitas yang baik dan strategi yang jitu dalam memasarkan produk-produknya, maka faktor pemasaran dapat menjadi kendala dalam pengembangan industri kecil, terutama dalam persaingan baik nasional maupun internasional.

Untuk itu peran pemerintah dalam membantu industri kecil sangat besar agar mampu mengatasi permasalahan pemasaran tersebut. Sebagaimana pendapat Hetifah Sjaifudin (1995, h. 66-75) bahwa pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional, hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga strategi dalam pengembangan pemasaran, antara lain (a) meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar, dengan menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi; (b) Proteksi Pasar, melalui konsumsi. Sekitar 10 persen dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan industri kecil. Selanjutnya penutupan sektor usaha tertentu dari investasi seperti ekspor tekstil diprioritaskan bagi industri kecil.

Hal ini patut dipertanyakan mengenai seberapa jauh peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri kecil mengingat adanya keterbatasan penguasaan teknologi dapat menjadi hambatan untuk bersaing di pasar internasional. Terlebih dengan diterapkannya standarisasi produk (ISO), *property right* serta *ecolabeling*. Seberapa besar keuntungan yang akan diraih oleh usaha kecil serta beban biaya yang harus ditanggung belum jelas; (c) Menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing. Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka.

Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infant industries* mendorong terciptanya iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasi ke arah bisnis. Peran Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM dalam pengembangan pemasaran adalah dengan meningkatkan akses usaha kecil kepada

pasar. Upaya tersebut ditempuh dengan mengikutsertakan industri kecil dalam pameran. Peran pemerintah yang demikian ini sejalan dengan pendapat Arsyad (1999, h. 120) bahwa terdapat empat peranan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan salah satunya adalah sebagai stimulator, dimana pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Stimulasi ini berupa pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk industri, membantu industri kecil untuk melakukan pameran.

Pengembangan pemasaran melalui pameran dan misi dagang dirasa sudah cukup berhasil dalam meningkatkan daya saing produk, terbukti dengan mengikuti pameran, para pengusaha kecil mampu untuk menarik pembeli dari luar negeri. Promosi produk-produk yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dapat pula meningkatkan daya saing produk, karena dirasa lebih efektif dan efisien. Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan dapat memperluas pemasaran, meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk-produk industri keripik tempe baik lokal, nasional maupun internasional, sebagaimana diutarakan oleh I Wayan Dipta (2005), bahwa promosi juga dapat meningkatkan daya saing UKM.

Selain itu, untuk mengembangkan pemasaran diperlukan pula pemahaman dari para pengusaha kecil tentang perencanaan pemasaran agar dapat meningkatkan daya saing produk, sebagaimana diutarakan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002, h. 255) yaitu: (a) pasar mana yang akan dimasuki; (b) produk apa yang bisa dikembangkan; (c) cara apa yang bisa dilakukan untuk lebih

mengenalkan produk; (d) Berapa harga yang seharusnya ditetapkan untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis; (e) Pihak-pihak mana saja yang bisa diajak bekerjasama untuk memasarkan produk.

Para pengusaha kecil juga harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pemasaran, agar dapat bersaing dengan produk sejenis, antara lain:

- a) Siapa dan berapa jumlah pembeli produk;
- b) Dimana daerah tujuan penjualan barang yang dibuat;
- c) Berapa usia sasaran dari penjualan barang;
- d) Berapa besar pendapatan dari penjualan barang;
- e) Siapa sajakah pesaing terhadap penjualan barang, baik itu posisi, jumlah dan mutu hasil produksi;
- f) Bagaimana perkembangan dari produk yang dibuat;
- g) Adakah barang pengganti dari produk yang dibuat;
- h) Bagaimana perkembangan dan pergeseran selera pembeli terhadap produk;
- i) Bagaimana perkembangan dan kelancaran suplai bahan baku ataupun penolong;
- j) Bagaimana hubungan antara pengusaha atau perajin dan penyalur (pengumpul);
- k) Bagaimana kemampuan perusahaan sendiri, apakah berkembang dengan menggunakan cara-cara atau metode baru dalam proses pembuatan barang yang dikerjakan ataukah masih menggunakan cara-cara yang tradisional;
- l) Bagaimana harga yang dipatok untuk setiap barang yang dijual (Anoraga dan Sudantoko, 2002, h. 260)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan Industri keripik tempe Agar Dapat Meningkatkan Daya Saing

a. Faktor Pendukung

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan daya saing industri dapat terlaksana dengan adanya faktor-faktor pendukung yang menunjang.

1) Faktor Pendukung Internal

a) Bahan Baku Yang Masih Cukup Tersedia

Faktor pendukung pertama dalam pemberdayaan industri adalah dukungan dari alam dengan adanya ketersediaan bahan baku yang masih cukup untuk memproduksi. Industri kecil, termasuk industri tempe dapat bertahan dan terpengaruh oleh adanya krisis moneter karena bahan baku yang dibutuhkan berasal dari luar daerah. Selain itu, ketersediaan bahan baku berpengaruh pula pada harga bahan baku.

Dengan tersedianya bahan baku yang cukup, maka harga bahan baku tersebut masih dapat dijangkau walau terkadang sulit. Ketersediaan bahan baku yang masih cukup ini juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyediakan bahan baku jadi untuk produksi. Dengan demikian akan lebih mempermudah para pengusaha kecil dalam mengolah bahan baku, serta tidak menyulitkan para pengusaha kecil untuk memperolehnya, sehingga kegiatan produksi dapat terus dilaksanakan dan diharapkan mampu meningkat. Adanya bahan baku yang berkualitas juga akan menunjang peningkatan daya saing industri.

b) Tenaga Kerja Yang Terampil dan Mudah Dilatih

Sumber Daya Manusia yang terampil merupakan faktor penting yang mempengaruhi maju-mundurnya industri kecil, karena dengan tenaga kerja yang terampil dan mudah dilatih maka akan mendukung kemajuan dan perkembangan industri. Kebanyakan tenaga kerjaterampil dan mudah dilatih berkaitan dengan teknik produksi pembuatan, karena proses pembuatan yang merupakan keterampilan tangan bersifat sederhana dan tidak terlalu rumit, sehingga memudah semua orang untuk mempelajarinya. Apalagi dengan keahlian yang diturunkan dari para pendahulu atau orang tua para pengusaha kecil, sehingga keahlian dan ketrampilan dalam membuat tempe sudah didapat ketika mereka masih anak-anak.

Dengan demikian, perkembangan industri kecil dari segi teknik produksi tidak perlu diragukan lagi, karena telah didukung oleh tenagakerja yang terampil dan mudah dilatih. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Thoha (1998, h. 32) mengenai jenis ketrampilan yang paling dikuasai oleh industri kecil adalah ketrampilan dibidang teknik produksi.

2) Faktor Pendukung Eksternal Sektor Pariwisata Merupakan Industri Penarik Yang Cukup Besar Untuk Meningkatkan Daya Saing

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Berbagai benda seni hasil budaya bangsa Indonesia telah terkenal dimanacnegara. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Dengan demikian sektor pariwisata juga merupakan sektor yang diandalkan karena dapat meningkatkan devisa negara, serta dapat memperkenalkan Indonesia kemancanegara.

Berkembangnya sektor pariwisata juga merupakan industri penarik yang cukup berpengaruh untuk meningkatkan daya saing produk tempe sebagai oleh-oleh, karena produk yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata, sehingga promosi untuk memperkenalkan produk tersebut dapat menggunakan sektor pariwisata. Sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Dipta (2005) bahwa faktor promosi juga sangat penting untuk mengangkat daya saing UKM. Dengan dicanangkannya Sentra Industri tempe sebagai Desa Wisata, maka akan dapat meningkatkan daya saing produk.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Penghambat Internal

a) Keterbatasan Permodalan

Pelaksanaan pemberdayaan industri keripik tempe agar dapat meningkatkan daya saing juga terhambat oleh terbatasnya permodalan yang dimiliki oleh para pengusaha kecil untuk mengembangkannya, sehingga dalam upaya pengembangan usaha tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Keterbatasan modal tersebut dirasakan ketika para pengusaha kecil ingin mengembangkan kreativitasnya dalam berbagai produk baru, selain itu, ketika pesanan yang datang melebihi kapasitas produksi, mereka tidak mampu untuk memenuhinya dan hanya dipenuhi sesuai dengan kemampuan produksi para pengusaha kecil.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para pengusaha kecil terbatasnya kemampuan para pengusaha kecil dalam hal permodalan usaha karena pada mulanya para pengusaha kecil menggunakan modal sendiri untuk memulai usaha, dan ketika sudah berjalan, modal atau biaya dalam proses produksi diperoleh dari keuntungan penjualan produk. Para pengusaha kecil juga

memilih untuk tidak meminjam modal usaha kepada pihak bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank berkaitan dengan surat izin usaha dan jaminan yang diberikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Siswoyo dan Maryadi (1995), dan Tulus Tambunan dalam Mahmud Thoha (1998, h. 92).

Kesulitan modal yang dialami oleh industri disebabkan oleh (2) kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan, terutama karena berbagai kelemahan yang melekat pada industri kecil dalam menghadapi perbankan modern antara lain karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif yang diperlukan, misalnya ketiadaan agunan, akuntansi yang kurang baik, prospek usaha yang kurang menjanjikan, dan lain sebagainya. Kondisi industri kecil yang demikian mengakibatkan mereka kurang *bankable*, atau kurang layak untuk menerima santunan pinjaman dari bank.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan permodalan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM sudah mengupayakan berbagai kebijakan yang dapat membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh tambahan modal, tetapi tidak mungkin semua hal yang berkaitan dengan permodalan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena berbagai keterbatasan kemampuan baik keuangan maupun sumberdaya manusia. Karena itu peran sektor swasta dalam membantu permodalan industri kecil juga sangat diharapkan, yaitu dengan program kemitraan permodalan antara industri menengah atau besar dengan industri kecil, atau antara institusi perbankan dengan para pengusaha industri kecil.

Dengan terbatasnya permodalan yang dimiliki oleh para pengusaha kecil, maka akan dapat dipastikan bahwa pengusaha kecil akan kesulitan untuk mengembangkan usahanya, sehingga dalam menghadapi persaingan tidak akan mampu bertahan karena tidak memiliki kelebihan untuk dapat mempertahankan usahanya.

b) Kultur Pengusaha kecil Masih Tertutup

Kultur atau budaya para pengusaha kecil yang tidak peduli dan masih tertutup dengan perkembangan dunia luar merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan industri tempe. Karena pengusaha kecil yang masih tertutup untuk menerima berbagai informasi akan tertinggal dalam hal perkembangan desain produk, maupun metode pemasaran. Hal ini dapat merugikan para pengusaha kecil karena tidak akan mampu bersaing dengan para pengusaha yang mau terbuka dan terus-menerus berinovasi untuk mengembangkan usahanya.

Diperlukan adanya peningkatan kesadaran sebagai salah satu langkah pemberdayaan para pengusaha kecil dalam memahami pentingnya membuka diri dengan berbagai perubahan yang terjadi didunia, agar mampu bertahan dan mempunyai daya saing. Untuk itu, pembinaan berupa motivasi dan dorongan dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan oleh para pengusaha kecil yang masih mempunyai kultur yang tertutup.

Sebagaimana diutarakan oleh Mangunhardjono (1986, h. 12) bahwa pembinaan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang mengalaminya untuk membetulkan dan mengembangkan

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara efektif.

c) Kemampuan Manajerial Yang Masih Rendah

Kemampuan para pekerja dalam hal penguasaan teknik produksi memang sudah cukup baik, tetapi kemampuan para pekerja dari segi manajerial masih belum dapat dikatakan baik. Sebagaimana diungkapkan Mahmud Thoha (1998, h. 33) meningkatnya skala usaha industri kecil diiringi dengan meningkatnya kemampuan teknik produksi, tetapi kemampuan manajemen dan teknik pemasaran tidak mengalami kenaikan atau perubahan secara berarti. Jika dilihat rendahnya kemampuan manajerial para pengusaha kecil juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para pengusaha dan pengusaha kecil.

Apalagi kebanyakan pekerja mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah. Secara otomatis rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemahaman mereka pada hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan pola manajerial. Kemampuan manajerial yang masih rendah akan mempengaruhi pemasaran, kemampuan membuat perencanaan dan investasi untuk jangka panjang, padahal agar dapat meningkatkan daya saing, diperlukan adanya kemampuan dalam manajemen serta perencanaan investasi jangka panjang.

Sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan (2005) bahwa kemampuan untuk membuat perencanaan jangka panjang merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi daya saing industri kecil. Untuk itu peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan industri tempe adalah dengan melakukan berbagai pembinaan penyuluhan dan pelatihan tidak hanya dari segi teknis saja, tetapi juga dari segi manajerial.

2) Faktor Penghambat Eksternal

a) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran juga merupakan masalah yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan industri kecil apabila tidak segera mendapatkan jalan keluar. Upaya pemberdayaan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM baik berupa pembinaan dan pengembangan, pelatihan serta bantuan modal dan peralatan masih bersifat insidental dan belum berkesinambungan dan terkadang tidak ada tindak lanjut dari program tersebut. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang diperuntukkan bagi program pemberdayaan industri kecil. Sehingga tingkat efektivitas program-program pemberdayaan tersebut masih dirasa sangat kurang bagi para pengusaha kecil.

Untuk mengatasi hambatan berupa keterbatasan anggaran dalam pemberdayaan industri kecil, diperlukan adanya perencanaan program pemberdayaan yang lebih baik dan berkesinambungan yang juga didukung oleh penyediaan anggaran yang memadai serta tujuan yang lebih jelas dan terarah agar program pemberdayaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan para pengusaha industri kecil, dan juga dapat meningkatkan daya saing industri kecil.

b) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk kegiatan pemasaran menjadi faktor penghambat pemberdayaan industri kecil. Apabila sarana dan prasarana pemasaran yang dibutuhkan masih belum memadai, akan berpengaruh pada tingkat penjualan produk, sehingga dapat dikatakan bahwa

hambatan dalam pemasaran merupakan kendala yang kritis bagi perkembangan industri kecil.

Demikian pula yang dihadapi oleh parapengusaha kecil di Madurejo. Masih terbatasnya sarana pemasaran berupasarana jalan yang sempit menyebabkan wisatawan enggan untuk masuk kedaerah Sentra Industri tempe. Pemerintah wajib untuk mencari jalan keluar dari hambatan-hambatan yang berkaitan dengan sarana pemasaran berupa infrastruktur jalan masih sempit.

Sebagaimana pendapat I Wayan Dipta (2005) bahwa dukungan jasa infrastruktur akan mempengaruhi tingkat daya saing UKM dan industri kecil. Infrastrukturnya yang belum memadai akan memperburuk atau mengurangi daya saing. Upaya memberdayakan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing, juga perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah untuk memfasilitasi dalam hal infrastruktur jalan, agar kelangsungan distribusi barang dapat berjalan dengan lancar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Peran Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM dalam Pemberdayaan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing industri tempe, dapat diambil kesimpulan:

1. Peran Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM dalam pemberdayaan industri tempe agar dapat meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan beberapa upaya sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM. Upaya-upaya tersebut adalah pembinaan di bidang permodalan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi dan peralatan, serta pengembangan pemasaran. Tetapi upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam pemberdayaan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing produk tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak diikuti peran serta masing-masing pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Karena peran Dinas Koperasi, Pasar dan UMKM hanya sebagai fasilitator dan stimulator untuk mendorong dalam upaya memberdayakan para pengusaha kecil. Para pengusaha kecil juga harus dapat mengembangkan usahanya sendiri secara mandiri bagi dari segi permodalan, kemampuan SDM, penyediaan teknologi dan peralatan yang menunjang produksi, serta strategi pemasaran agar barang yang diproduksi dapat memiliki daya saing di pasaran.
2. Peran Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM dalam pelaksanaan pemberdayaan industri tempe agar dapat meningkatkan daya saing didukung dengan berbagai faktor yaitu :

- a. Faktor pendukung internal yang mendorong pemberdayaan industri tempe berupa: Bahan baku yang masih cukup tersedia menunjang keberlanjutan produksi serta banyak tenaga kerja terampil dan mudah dilatih untuk mempertahankan serta mengembangkan industri tempe.
 - b. Faktor pendukung eksternal yang mendorong pemberdayaan industri tempe berupa: Sektor pariwisata merupakan industry penarik yang cukup besar untuk mengembangkan usaha, karena industri tempe merupakan salah satu yang juga berkaitan erat dengan sektor pariwisata.
3. Dalam proses pemberdayaan agar dapat meningkatkan daya saing juga tidak lepas dari berbagai hambatan, antara lain:
- a. Faktor penghambat internal berupa: Keterbatasan permodalan yang dimiliki para pengusaha kecil akan menghambat pengembangan usaha, karena para pengusaha kecil tidak mampu berkreasi lebih banyak dan harus melepaskan peluang yang datang, karena keterbatasan modal yang mereka miliki; Kultur pengusaha kecil yang masih tertutup mengakibatkan beberapa pengusaha kecil tidak mau mengikuti program-program dan kegiatan dari pemerintah, karena khawatir rahasia tentang ketrampilan yang dimiliki dan metode meraih kesuksesan yang telah mereka raih akan dibocorkan oleh pemerintah kepada pengusaha kecil lainnya, serta enggan untuk mengikuti perkembangan dunia yang terjadi diluar baik tentang teknologi, informasi, industri, seni dan kerajinan, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil sangat terbatas; Kemampuan manajerial yang masih rendah menghambat pengembangan usaha, karena belum dapat mengatur kegiatan usaha secara jelas antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi.

- b. Faktor penghambat eksternal berupa: keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai program pemberdayaan bagi industri tempe, mengakibatkan tidak semua program pemberdayaan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh para pengusaha kecil; ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran yang belum memadai juga menghambat dalam pemberdayaan industri tempe, karena untuk mengenalkan produk yang dibutuhkan sarana yang layak dari segi infrastruktur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan maka penulis memberikan saran-saran, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Koperasi, Pasar, dan UKM dan para pengusaha kecil dalam pelaksanaan pemberdayaan industri tempe agar dapat meningkatkan daya saing. Adapun saran atau rekomendasi yang penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan permodalan para pengusaha kecil akan menghambat pengembangan industri keripik tempe untuk meningkatkan daya saingnya, sehingga perlu adanya alternatif kebijakan dari pemerintah yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada, yaitu: (a) Lebih meningkatkan penyebarluasan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah di bidang permodalan/keuangan yang ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan industri, sehingga informasi tersebut benar-benar sampai kepada para pengusaha kecil. Usaha tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan semua media informasi yang ada, sedangkan upaya tidak langsung dapat melalui Paguyuban Pengusaha tempe sebagai bentuk asosiasi

para pengusaha kecil. Dengan bergabungnya para pengusaha industri kecil tersebut diharapkan bukan hanya informasi bisnis yang diterima tetapi juga interaksi positif yang saling memperkuat. (b) Meningkatkan peran sektor swasta dalam pelaksanaan kemitraan permodalan antara industri kecil dengan industri besar atau industri menengah, selain itu, kemitraan permodalan juga dapat dilakukan melalui usaha modal ventura atau Bank bagi Hasil. Industri kecil tidak dibebani kewajiban membayar bunga dan angsuran pinjaman, karena keterlibatan lembaga keuangan merupakan bentuk penyertaan modal, meskipun bersifat sementara.

2. Kesulitan pemasaran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri tempe, dalam upaya untuk meningkatkan daya saingnya. Untuk mengatasi kesulitan pemasaran alternatif kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah: mendorong kembali industri atau usaha berskala besar dan menengah untuk menjalin kemitraan di bidang pemasaran dengan para pengusaha kecil tempe. Hal ini perlu dilakukan karena kesulitan pemasaran produk-produk industri kecil seringkali terjadi bukan semata-mata karena kualitas produk yang kurang memadai, melainkan karena lemahnya kemampuan di bidang pemasaran itu sendiri. Kemitraan antara industri kecil dan industri menengah atau besar juga bertujuan untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak.
3. Untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknik produksi manajemen, maka kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dengan memperbanyak penyuluhan, kemudian diikuti pembinaan dan peningkatan ketrampilan di bidang teknik produksi dan manajemen, misalnya di bidang manajemen, pelatihan dapat dilakukan dengan melakukan kursus singkat tentang

pembukuan perusahaan secara sederhana. Dalam pemilihan materi untuk pelatihan dan penyuluhan dapat pula dilakukan dengan dialog kepada para pengusaha kecil tentang kebutuhan atau pengetahuan apa yang diinginkan. Selain itu pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan harus pula mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Untuk meningkatkan kemampuan mental dan spiritual para pengusaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin lama semakin ketat, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan semangat dan profesionalitas serta pemberian motivasi tentang keberhasilan usaha agar para pengusaha kecil dapat bangkit kembali menghadapi persaingan yang terjadi. Pelatihan dapat dilaksanakan dengan mendatangkan motivator usaha yang berpengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Bhineka Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*. Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan Pertama. Airlangga University Press, Surabaya.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Chambers. R., 1987, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, LP3ES. Jakarta.
- Danun, Sudarwan, 1997, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
- Denzin K Norman, Lincoln S. Yvonna, 2009. *Handbook Of Qualitative Research*, Cetakan Kesatu. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Diogo, Fransiskus Roberto, 2001, *Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Tesis, Universitas Brawijaya. Malang.
- Dunn, William N, 2003, *Analisa Kebijakan Publik*. Penerjemah, Muhadjir Darwin, Hanindita Offset (YA3), Malang.
- Faisal. Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Yayasan Asih-Asah-Asuh (YA3). Malang.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta
- Islamy, Moch Irfan, 1997, *Pinsip-pinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, Matthew, dan Michael A. Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi dan Pendamping Mulyarto, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

- Suharto, Edi, 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sukowati, Praptining, 2008. *Model New Government dalam Good Government*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Sukowati, Praptining, 2009. *Public Service management di era Reformasi*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Sukowati, Praptining, 2010. *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Suradinata, Ermaya, 1994, *Teori dan Praktek Kebijakan Negara*. Ramadan, Bandung.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Kepala/Sekretaris/Kabid Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, Dinas BPMDes, Kab. Ktw. Barat atau yang mewakili

1. Apakah Disperindag mempunyai visi, misi dan mandat tentang industri mikro dan kecil ?
2. Bagaimanakah peran bapak sebagai Disperindag untuk meningkatkan industri mikro dan kecil ?
3. Apakah struktur organisasi/SOTK turut mempengaruhi penerimaan industri mikro dan kecil ?
4. Apakah yang menjadi strategi dalam pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
5. Sebagai suatu proses, pemberdayaan industri mikro dan kecil tidak lepas dari kegiatan; Koordinasi baik vertikal maupun horizontal. Bagaimana pelaksanaannya selama ini?
6. Bagaimana sistem insentif yang ditawarkan dalam pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
7. Sejauhmana pengawasan yang dilakukan industri mikro dan kecil?
8. Sejauh manakah peran serta SKPD yang bapak pimpin terhadap pemberdayaan industri kecil?
9. Apakah Disperindag mempunyai anggaran khusus untuk pemberdayaan industri mikro dan kecil?
10. Bagaimana peran Disperindag Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal penerimaan PAD khususnya sektor industri mikro dan kecil ?
11. Untuk mengukur kinerja Disperindag Kabupaten Kotawaringin Barat, bagaimana potensi industri mikro dan kecil terhadap sumbangannya pada PAD?
12. Menurut bapak bagaimana kinerja Disperindag Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemberdayaan industri mikro dan kecil dilihat dari mekanisme kerja maupun kemampuan aparat sebagai pelaksana lapangan?

13. Apakah sumberdaya (Anggaran, SarPras, SDM, Teknologi Informasi) yang ada telah mencukupi dalam hal meningkatkan pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
14. Apakah dukungan dana dari APBD pada Disperindag Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencukupi?
15. Menurut bapak, apakah diperlukan penyusunan Peraturan Daerah tentang industri mikro dan kecil mampu meningkatkan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat?
16. Apakah ada mekanisme *reward and punishment* terhadap petugas pemberdayaan ataupun pengawasan?
17. Menurut Bapak, apakah selama ini semua potensi industri mikro dan kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terdaftar di SKPD? Jika belum, masalah apa yang jadi kendala?
18. Apakah pelayanan SKPD terhadap pengusaha kecil selama ini sudah cukup efektif dan efisien?
19. Sebagai sebuah proses, mulai dari pendataan, penyampaian informasi pasar dan pemberdayaan industri mikro dan kecil tidak lepas dari kegiatan koordinasi. Bagaimana pelaksanaannya selama ini?
20. Bagaimana pendapat Bapak tentang data industri diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat?
21. Apakah upaya – upaya yang dilakukan SKPD dalam menanggapi keluhan pengusaha (misalnya: kekosongan bahan baku, pasar yang sepi, dll)
22. Apa langkah yang telah diambil oleh bapak dalam melaksanakan peraturan tentang industri mikro dan kecil ?
23. Apakah pernah dilaksanakan pembinaan, bimbingan dan ketrampilan dalam hal pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
24. Apakah industri mikro dan kecil saat ini pajak/retribusi yang dikenakan kepada Pengusaha Industri Mikro dan Kecil telah sesuai dengan penetapan tarif pajak?
25. Jika merujuk kepada data yang ada, realisasi penerimaan PAD dari sektor industri mikro dan kecil dari tahun 2010-2013 menunjukkan

angka yang fluktuatif, ada yang melebihi, mencapai anggaran dan kurang dari anggaran yang telah ditetapkan. menurut bapak mengapa hal tersebut bisa terjadi?

26. Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi realisasi tersebut?

B. Camat/Kasi Tapem Lingkup Kecamatan Arut Selatan

1. Keadaan problematika apakah yang dihadapi oleh Kecamatan Arut Selatan dalam masalah industri mikro dan kecil ?
2. Apakah strategi dalam upaya pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
3. Menurut Bapak apakah pemberdayaan sektor industri mikro dan kecil yang ada saat ini telah realistic? Sejauhmana keterlibatan Bapak dalam menentukan hal tersebut?
4. Upaya apakah yang akan dilakukan untuk menggali potensi dengan pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
5. Menurut bapak, bagaimana kesadaran pengusaha terhadap dalam pelaporan usaha serta injinnya?
6. Menurut bapak, alasan apa yang membuat pengusaha enggan melapor?
7. Dalam hal pemberdayaan industri mikro dan kecil , apakah sudah pernah ditempuh langkah dengan melibatkan instansi lain?
8. Menurut bapak, bagaimana sikap petugas (Kasi PMD/Kesra) saat melaksanakan tugasnya dalam hal melakukan pemberdayaan?

C. Lurah/Kasi Kesra Lingkup Kelurahan Madurejo

1. Bagaimana peran Bapak dalam pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
2. Apakah kendala utama yang dihadapi selama ini dalam rangka meningkatkan pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
3. Apa saja yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat dalam membuka usaha sektor industri mikro dan kecil ?
4. Apakah di setiap Kelurahan dilibatkan dalam pemberdayaan industri mikro dan kecil ?

D. Pengusaha

1. Apakah dampak yang dirasakan Pengusaha Industri Mikro dan Kecil dengan adanya perubahan kebijakan (misalnya Otonomi Daerah atau Kebijakan Perpajakan yang baru?)
2. Apakah kendala, hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan Usaha industri mikro dan kecil ?
3. Bagaimana kinerja Pemerintah yang diamati selama ini, khususnya dalam pemberdayaan industri mikro dan kecil ?
 - a. Kualitas Pelayanan
 - b. Responsivitas
 - c. Akuntabilitas
4. Saran dan kritik apakah yang diberikan dalam upaya peningkatan pemberdayaan usaha sektor industri mikro dan kecil ?

Catatan :

- 1) *Pertanyaan bisa lebih dikembangkan pada saat dilakukan wawancara.*
- 2) *Jika wawancara dengan pejabat tidak memungkinkan, maka data akan diambil dari pejabat yang mewakili saat itu.*

4. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

6. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

7. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

8. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

10. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

11. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

13. Pertanyaan :
Jawaban :

14. Pertanyaan :
Jawaban :

15. Pertanyaan :
Jawaban :

16. Pertanyaan :
Jawaban :

17. Pertanyaan :
Jawaban :

- 18. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 19. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 20. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 21. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

22. **Pertanyaan** :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

23. **Pertanyaan** :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

24. **Pertanyaan** :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

25. **Pertanyaan** :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

26. **Pertanyaan** :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
27. Pertanyaan :
Jawaban :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pangkalan Bun, 2014

Narasumber.

.....

DOKUMENTASI





